

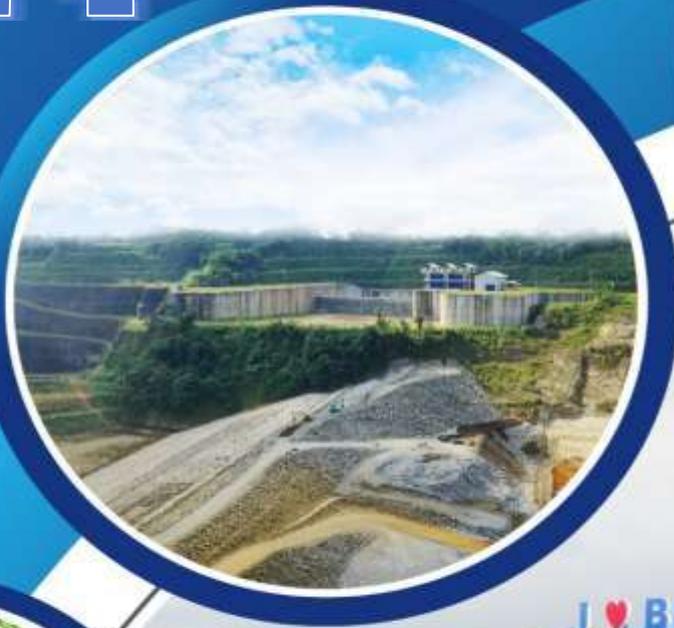


KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

Laporan Kinerja

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

2024





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun dengan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun 2024. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan Panduan Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR, laporan ini diharapkan memenuhi standar penilaian Kementerian PAN dan RB terkait kualitas Laporan Kinerja dan dapat mempresentasikan kinerja yang telah dilakukan.

Laporan kinerja ini memuat gambaran umum mengenai berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang dicapai, serta tantangan yang dihadapi Direktorat PPSIDA selama tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis TA 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat menghargai setiap masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja yang telah dicapai serta memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja ke depan.

Jakarta, 17 Januari 2025
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air,

Harya Muldianto †
NIP. 19690904199031002





RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (“Direktorat PPISDA”) merupakan Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Dalam mengemban tugas penyelenggaraan infrastruktur nasional, Kementerian PUPR telah merumuskan Sasaran Program (SP) yang salah satunya menjadi tanggung jawab DJPI, yaitu “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”. Sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat PPISDA adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan target sebesar 25% yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur PPISDA.

Untuk mendukung capaian target kinerja diatas, Direktorat PPISDA menyusun sedemikian rupa rencana strategis yang tertuang menjadi 4 (empat) KRO yaitu: Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana (ABF), Kemitraan (AEE), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (EBD). Guna mendukung kinerjanya, Direktorat PPISDA didukung oleh beberapa sumber daya yaitu:

1. Pagu anggaran belanja Direktorat PPISDA pada tahun 2024 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) sesuai DIPA NOMOR : SP DIPA-033.16.1.631003/2024 tanggal 24 November 2023. Mengalami 5x revisi DIPA dengan pagu diakhir tahun sebesar Rp 11.075.700,00 (sebelas milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Sumber daya manusia, jumlah pegawai Direktorat PPISDA sebanyak 52 orang dengan komposisi pegawai tersebut terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 35 orang, sedangkan pegawai non PNS (Honorar dan TPI) sebanyak 17 orang pegawai.

Capaian IKK Direktorat PPISDA tahun 2024 adalah 23,77% dari target 25%. Capaian ini meningkat +0,86% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 22,91%. Adapun nilai capaian kinerja dibawah target disebabkan belum tercapainya target *output* pada KRO Kemitraan (AEE) dengan *cut off* target **Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan** (minimal tahap prakualifikasi). Direktorat PPISDA hanya tercapai 1 (satu) dari 2 (dua) kesepakatan yang telah ditargetkan dalam DIPA. 2 (dua) proyek yang ditargetkan untuk





mencapai kesepakatan adalah (1) Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji; dan (2) Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah. Dari 2 (dua) proyek yang ditargetkan ini, yang tercapai adalah **Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji** dengan status proyek per Desember 2024 adalah **Pra Kualifikasi (tahap Transaksi)**.

Berdasarkan iemonitoring PUPR tanggal 31 Desember 2024, realisasi keuangan Direktorat PPISDA sebesar 95,22% atau senilai Rp10.546.197.000,00 (sepuluh milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Sementara realisasi fisik berdasarkan data e-Monitorng status 31 Desember 2024 pk. 16.00 WIB sebesar 96,83% sehingga terdapat deviasi sebesar +3,58% dari rencana awal 93,25%.

Keberhasilan Direktorat PPISDA dalam mencapai target capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor pendukung, diantaranya keterlibatan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan capaian kinerja, pembagian tugas dan fungsi yang seimbang bagi seluruh pegawai, melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, serta dukungan dan kerjasama dari Instansi/Unit Organisasi/Unit Kerja lain dalam melakukan percepatan penyiapan proyek KPBU sektor sumber daya air.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat PPISDA dan mempengaruhi dalam melakukan penyiapan proyek KPBU sektor sumber daya air, seperti perubahan ruang lingkup proyek, perubahan rencana perusahaan proyek, serta permasalahan dalam mencapai kesepakatan dengan para pemangku kepentingan untuk finalisasi proyek KPBU.

Pada tahun 2024, Direktorat PPISDA mendapatkan rekomendasi untuk meraih Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis SNI ISO 37001: 2016 dari PT Mutu Andalan Sistem (MAS). Pada tanggal 28 November 2024, Direktorat PPISDA resmi tersertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP, sehingga diharapkan Direktorat PPISDA mampu mengimplementasikan penguatan sistem manajemen organisasi guna mencegah praktik korupsi, menghindari risiko permasalahan hukum, ataupun mengontrol konflik kepentingan dalam upaya pencapaian kinerja pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.





DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
1.3.1 Struktur Organisasi.....	3
1.3.2 Sumber Daya Manusia	4
1.4 Sarana dan Prasarana	9
1.5 Isu Strategis	11
1.6 Sistematika Laporan	11
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.1.1 Visi dan Misi.....	14
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi	15
2.1.3 Program dan Kegiatan.....	17
2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA	18
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal.....	19
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir.....	22
2.2.3 Kronologi Perubahan PK.....	23
2.3 Metode Pengukuran.....	23
2.4 Target Kinerja dalam Pemenuhan Renstra	27
2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra	31
2.4.2 Target Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Renstra dan PK	31
BAB III	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	33
3.2 Capaian Kinerja.....	39





3.3 Analisis Perbandingan Kinerja	52
3.3.1 Analisa Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	52
3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah	53
3.3.3 Analisis Perbandinga Kinerja dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>) 55	
3.4 Analisis Realisasi Anggaran	56
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	58
3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2024	63
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya ..	64
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
3.5.1 Efisiensi Metode Kegiatan	65
3.5.2 Efisiensi Anggaran	66
3.6 Penghargaan Atas Kinerja	68
3.7 Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja	69
3.7.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja	70
3.7.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja	71
3.7.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja	72
3.7.4 Analisis Terhadap Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Berkala	73
3.7.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	74
3.7.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	74
3.7.7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	75
BAB IV	76
PENUTUP	76
4.1 Simpulan Umum	76
4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan	76
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	77





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.2 Sarana Prasarana	10





DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Struktur Organisasi	3
Gambar1.2 Pegawai Direktorat PPISDA	4





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya di sebut SAKIP merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang di rancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja/unit kerja, unit organisasi sampai tingkat kementerian/lembaga. Kinerja disini merupakan hasil/output dari suatu kegiatan/program yang telah maupun hendak di capai, dari mulai dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, laporan kinerja sampai dengan review dan evaluasi kinerja sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dengan jelas.

Laporan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Direktorat PPISDA) Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat PPISDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat PPISDA sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Direktorat PPISDA.

Lakin Direktorat PPISDA disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menggunakan kaidah penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR yang diterbitkan oleh BPIW dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 09/PRT/M/2018 mengatur tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

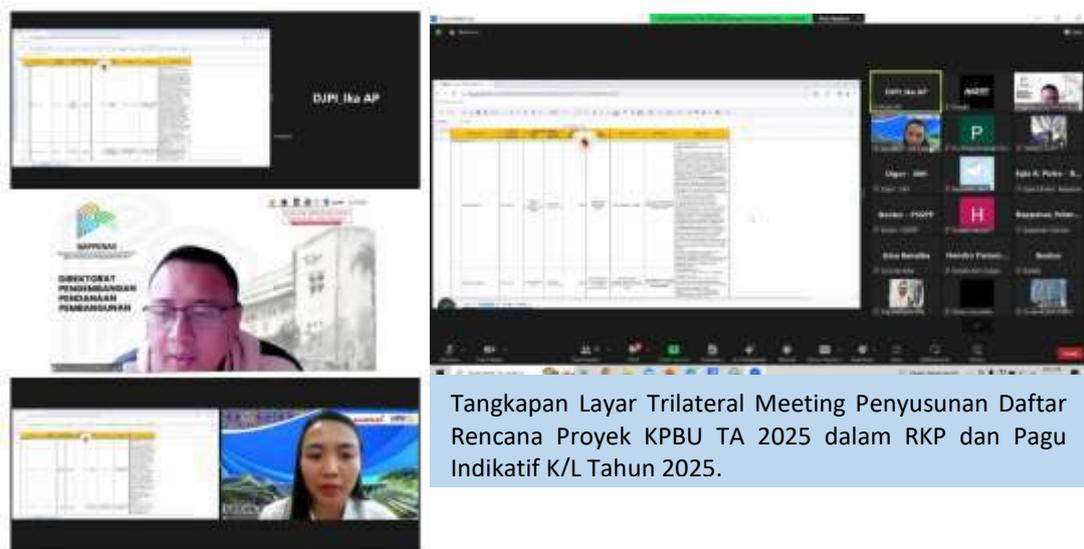




1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 pasal tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Direktorat PPISDA mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PPISDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

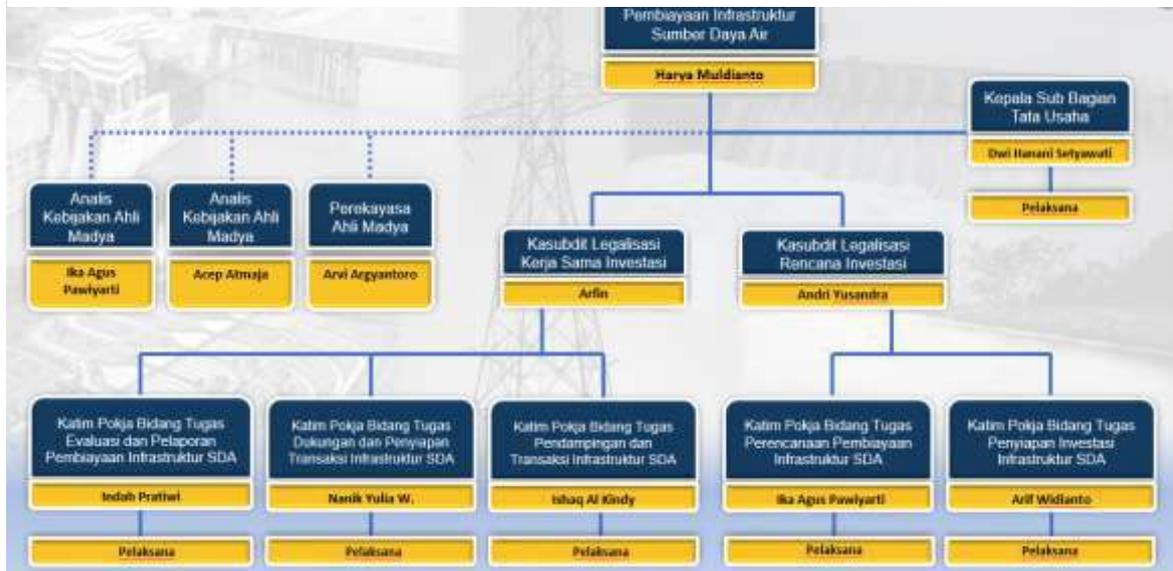




1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber: Permen PUPR No. 13 tahun 2020

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat PPISDA didukung oleh struktur organisasi yang setiap bagiannya saling bersinergi mengatur mendistribusikan tugas secara proporsional yang dikelompokkan menjadi:

a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta





pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air

c. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PPPISDA didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola program/kegiatan dalam berbagai jenjang dan klasifikasi. SDM ini merupakan salah satu variabel penting dalam konteks keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Oleh karena itu, produktivitas suatu organisasi tidak akan terlepas dari produktivitas SDM yang menjadi penggerak dari organisasi tersebut. Pengelolaan SDM aparatur bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang memiliki kualitas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. SDM aparatur yang **berAKHLAK** diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, serta mencapai Sasaran Strategis Kementerian.

Gambar1.Error! No text of specified style in document..2 Pegawai Direktorat PPISDA



Sumber: Dokumentasi Direktorat PPISDA





Secara lebih rinci, setiap unsur dalam akronim **berAKHLAK** memiliki makna dan tujuan spesifik dalam konteks pengelolaan SDM aparatur:

1. **Berorientasi Pelayanan:** SDM aparatur harus fokus pada pelayanan publik dengan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.
2. **Akuntabel:** SDM aparatur harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan negara.
3. **Kompeten:** SDM aparatur harus memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta terus meningkatkan diri untuk menghadapi tantangan yang berkembang.
4. **Harmonis:** SDM aparatur harus bekerja dalam suasana yang kondusif, saling menghormati dan menjaga kerjasama antar individu dan tim.
5. **Loyal:** SDM aparatur harus memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap negara, pemerintah, dan tugas yang diemban, dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
6. **Adaptif:** SDM aparatur harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan kerja, kebijakan, dan teknologi yang terus berkembang.
7. **Kolaboratif:** SDM aparatur harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi, untuk mencapai tujuan bersama.

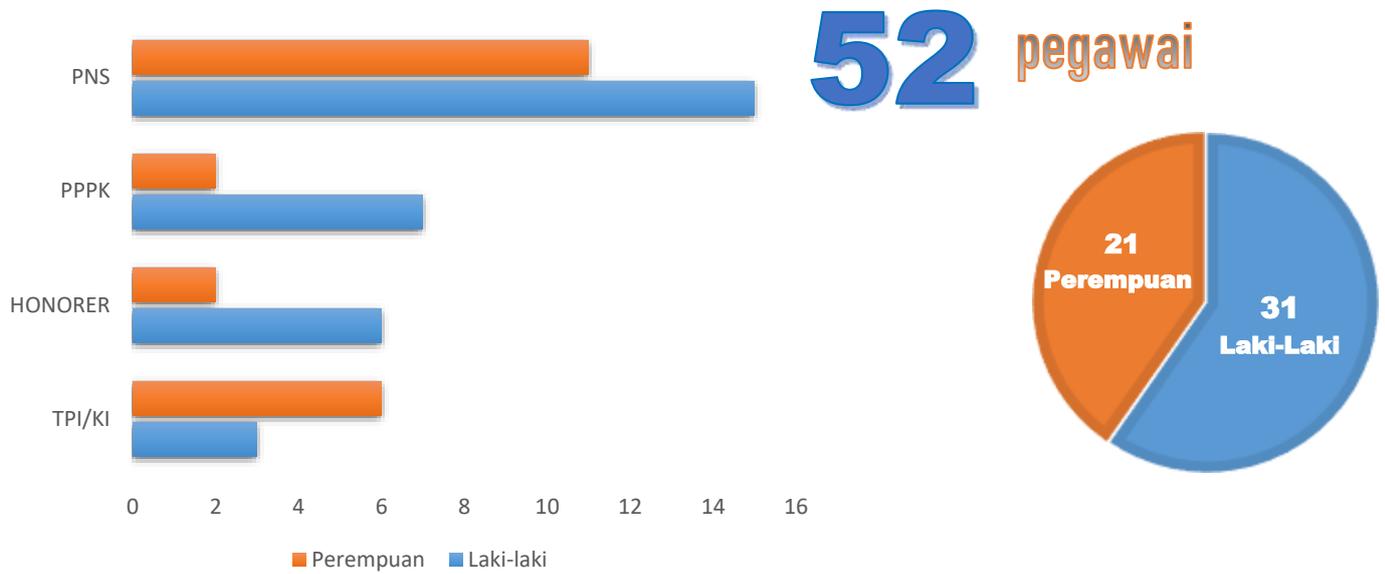
1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Pada tahun 2024, Direktorat PPISDA didukung oleh SDM sebanyak 52 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 35 orang, sedangkan pegawai non PNS (Honorar dan TPI) sebanyak 17 orang pegawai. Berdasarkan gender, persentase pegawai laki-laki sebesar 59,61% dan perempuan sebesar 40,39%. Angka ini menunjukkan bahwa selisih (gap) antara pegawai laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh signifikan. Adanya kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas di Direktorat PPISDA diharapkan dapat memotivasi semua pegawai mempunyai kapasitas dan kompetensi sesuai keahliannya tanpa melihat latar belakang jenis kelamin. Rincian jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan gender dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar1. Error! No text of specified style in document..3 Komposisi Pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin

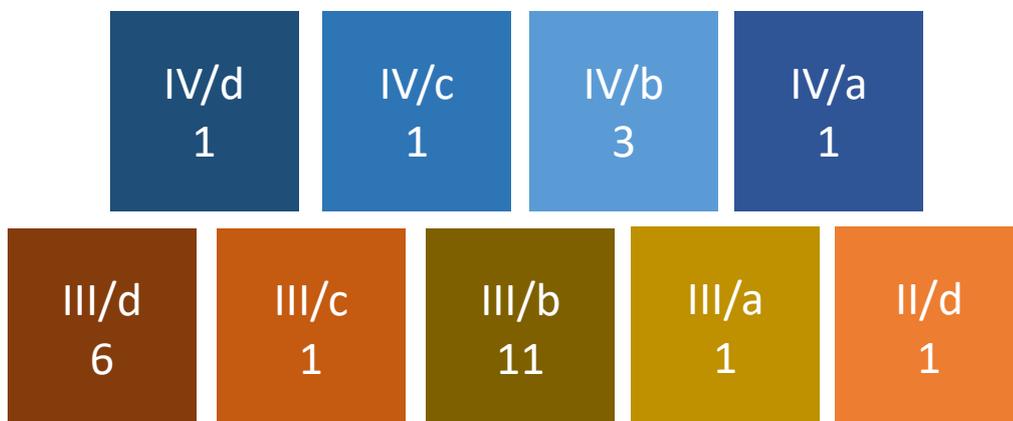


Sumber: Data Kepegawaian Subbagian Tata Usaha

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Berdasarkan golongan, PNS di Direktorat PPISDA sebanyak 26 orang didominasi oleh golongan III sebagai 19 orang. Sementara, pegawai golongan IV dan golongan II secara berurutan berjumlah 6 orang dan 1 orang. Perbandingan untuk masing-masing PNS di Unit Kerja Direktorat PPISDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar1. Error! No text of specified style in document..4 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan





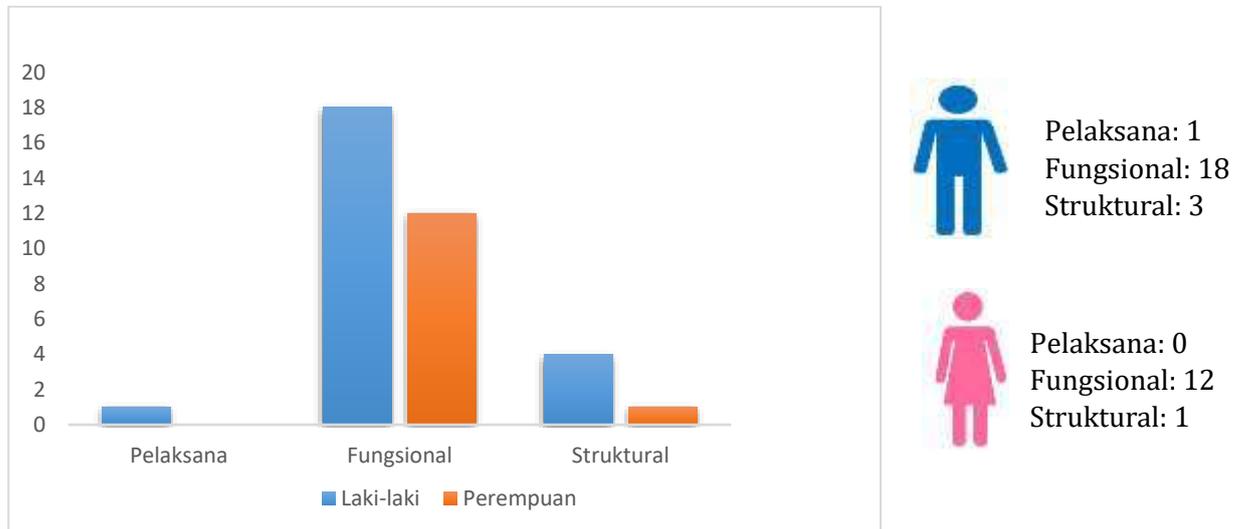
Tabel 1. Error! No text of specified style in document..1 Tabel Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
IID	1	0	1
IIIA	0	1	1
IIIB	6	5	11
IIIC	0	1	1
IIID	3	3	6
IVA	0	1	1
IVB	3	0	3
IVC	1	0	1
IVD	1	0	1

Sumber: Data Kepegawaian Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan golongan kelompok jabatan di unit kerja PPISDA, pegawai didominasi oleh pejabat fungsional sebanyak 30 orang dan pejabat pelaksana sebanyak 1 orang. Sementara untuk pejabat struktural yaitu 4 orang yang terdiri atas Eselon II, Eselon III, dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Komposisi berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Gambar 1. Error! No text of specified style in document..5 Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Jabatan



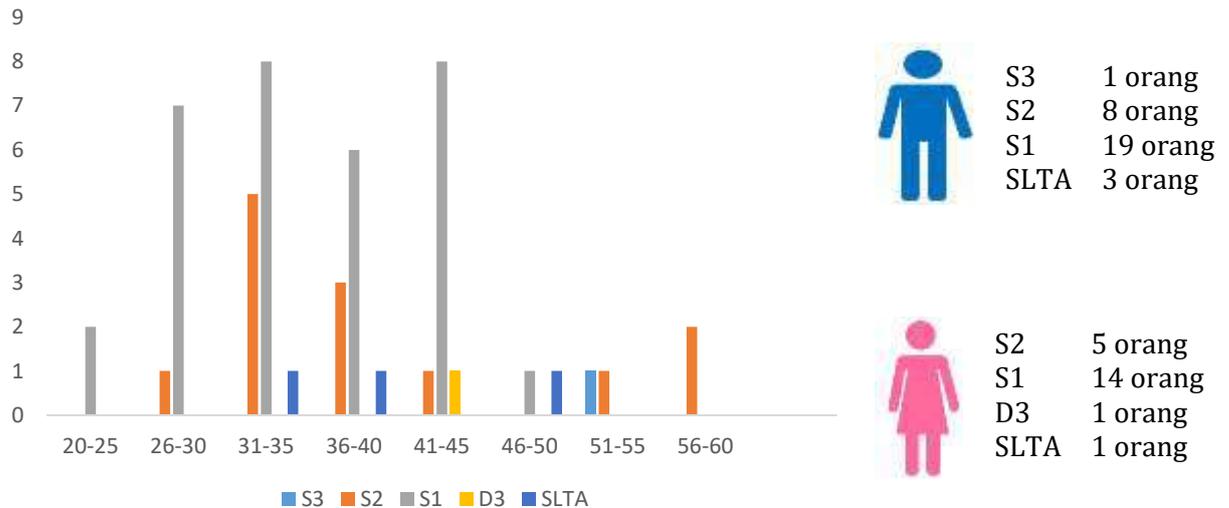
Sumber: Data Kepegawaian Subbagian Tata Usaha





1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Gambar Error! No text of specified style in document.Error! No text of specified style in document..6 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Usia



Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Direktorat PPISDA mayoritas merupakan sarjana (S1/D4) sebanyak 33 orang (63.46%) dan diikuti master (S2) 13 orang (25%). Sementara tingkat pendidikan doktor (S3) berjumlah 1 orang dan di bawah S1/D4 berjumlah 5 orang.

Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis Kompetensi Direktorat PPISDA melakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan dukungan untuk mengikuti pelatihan. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kepribadian profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier. Pada tahun 2024, tercatat ada 3 PNS yang sedang mengikuti Karyasiswa Magister, 14 Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Pendidikan dan 3 Pegawai mengikuti Pembinaan Kinerja di E-Kinerja.

Berdasarkan kelompok usia sebanyak 14 orang (26.92%) berusia 31-35 tahun. Pada kelompok usia 26-30 dan usia 36-40 masing-masing berjumlah 8 orang (15.38%)





dan 10 orang (19.23%). Sementara secara berurutan kelompok usia 20-25 tahun, 41-45 tahun, 46-50 tahun, 51-55 tahun, dan 56-60 tahun yaitu, 2 orang, 11 orang, 2 orang, 2 orang, dan 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai PPISDA didominasi oleh pegawai berusia di bawah 40 tahun. Sehingga diharapkan SDM dapat mendukung produktivitas kinerja PPISDA dalam melakukan tugas dan fungsinya.

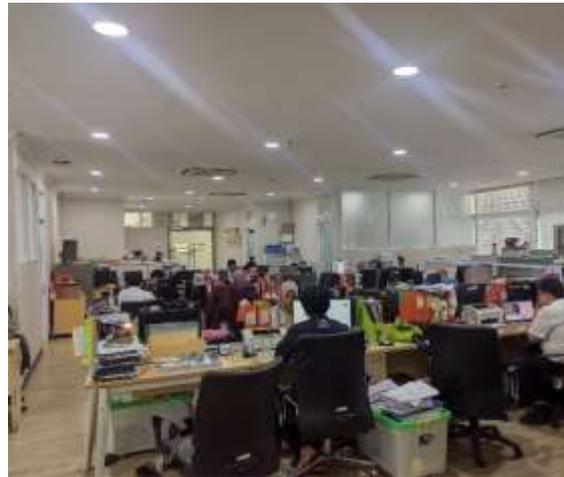
1.4 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja organisasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, penyediaan prasarana ruangan menjadi hal yang sangat diperlukan. Ruang yang digunakan Direktorat PPISDA meliputi ruang kerja, ruang rapat, fasilitas ibadah, dan ruangan penyimpanan. Daftar ruangan yang digunakan oleh Direktorat PPISDA dapat dilihat pada Gambar 1.6

Gambar 1.7 Ruang yang digunakan di Direktorat PPISDA



Ruang Kerja tampak depan



Ruang Kerja tampak Belakang



Ruang Rapat Direktorat PPISDA



Ruang Penyimpanan





Secara keseluruhan, kualitas barang milik negara (BMN) di Direktorat PPISDA berkondisi baik, namun terdapat beberapa fasilitas tersebut diantaranya dalam kondisi rusak dan jumlahnya belum optimal untuk mencukupi kebutuhan eksisting. Rekapitulasi data sarana dan prasarana Direktorat PPISDA adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sarana Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah			Kondisi BMN		
		Kebutuhan	Tersedia	Selisih	Baik	Cukup Baik	Rusak
1	Lemari Besi/Metal	11	11	-	11	-	-
2	Filling Cabinet Besi	20	9	11	9	-	-
3	Alat Penghancur Kertas	10	9	1	4	4	1
4	LCD Projector/Infocus	2	2	-	2	-	-
5	Acces Control System	1	1	-	1	-	-
6	Focusing Screen/Projector	1	1	-	-	1	-
7	Meja Kerja Kayu	50	36	14	22	14	-
8	Kursi Besi/Metal	2	2	-	-	2	-
9	Meja Rapat	10	2	8	2	-	-
10	Nakas	5	1	4	1	-	-
11	Meubelair lainnya	5	2	3	2	-	-
12	Air Cleaner	1	1	1	-	-	-
13	A.C Sentral	5	5	-	5	-	-
14	A.C Split	6	5	1	5	-	-
15	Exhause Fan	4	2	2	-	2	-
16	Televisi	3	3	-	3	-	-
17	Camera Digital	2	-	2	-	-	-
18	Camera Conference	2	1	1	1	-	-
19	P.C Unit	45	30	15	10	20	-
20	Note Book	20	4	16	-	4	-
21	Tablet PC	5	1	4	1	-	-
22	Printer	18	18	-	10	-	8
23	Scanner	-	-	-	-	-	-





24	Access Point	1	1	-	1	-	-
25	PC Unit	5	3	2	3	-	-
26	Camera Adaptor	1	1	-	-	1	-
Total		235	151	84	94	48	9

1.5 Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat PPISDA dalam menunjang pelaksanaan kegiatan selama 2024 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas fiskal Kementerian PUPR dalam penyediaan anggaran *Availability Payment* (AP) untuk proyek KPBU terutama pada proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air.
2. Ruang lingkup Operasi dan Pemeliharaan dalam KPBU SDA. PT. PII membutuhkan dokumen tersebut sebagai landasan untuk dapat memproses lebih lanjut saat proses penjaminan.
3. Belum adanya aturan yang mengatur tentang KPBU dengan skema kerja sama *Build-Own-Operate* (BOO)
4. Kompleksitas struktur kelembagaan pada proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air terutama pada proyek KPBU Operasi dan Pemeliharaan dengan struktur OP eksisting.

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menggunakan kaidah penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR yang diterbitkan oleh BPIW adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isi/permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Direktorat PPISDA.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Direktorat PPISDA 2020 – 2024, PK Direktorat PPISDA 2024, dan target tahun 2024 menurut Renstra dan DIPA.





Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Kementerian PUPR 20xx, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, analisa perbandingan kinerja, analisa realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur PUPR.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Direktorat PPISDA sebagai salah satu unit eselon II dalam Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tanggung jawab untuk mendukung Unor Teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) untuk melaksanakan *major project* yang tercantum dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dukungan tersebut terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPBU sektor sumber daya air.

Rencana Strategis Direktorat PPISDA Tahun 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024.

Capaian pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2015-2019 dalam bidang Sumber Daya Air adalah pembangunan 29 bendungan baru sebagai bagian dari rencana pembangunan 65 bendungan 2015-2019, sehingga kapasitas tampung per kapita meningkat menjadi 59,91 m³/detik. Dengan tambahan bendungan baru tersebut, layanan air irigasi untuk 12,5% lahan sawah beririgasi di Indonesia dapat dilayani oleh waduk. Selain itu, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, telah dibangun 0,99 juta Ha irigasi baru dan rehabilitasi pada 2,9 juta Ha irigasi eksisting. Dalam rangka mendukung akses air minum universal, pembangunan bendungan baru menambah kapasitas air baku sebesar 24,9 m³/detik.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB skenario menengah dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp.6.445 Triliun. Akan tetapi, kemampuan penyediaannya hanya sebesar 3,46% dari PDB sehingga terdapat *gap* cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Untuk itu diperlukan upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, pembangunan 18 waduk multiguna menjadi salah satu *major project* dengan indikasi pendanaan sebesar





Rp.201, 5 Triliun dimana Rp.47,5 Triliun dipenuhi oleh APBN, Rp.90 Triliun dipenuhi oleh KPBU, dan Rp.64 Triliun dipenuhi oleh swasta. Manfaat dari *major project* ini adalah tersedianya pasokan air baku dari waduk sebesar 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MW dan tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium.

Direktorat PPISDA merupakan salah satu unit kerja di DJPI yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung Unor Teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) untuk melaksanakan *major project* yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024. Dukungan tersebut terkait pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dan Pemerintah (KPBU) sektor sumber daya air.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kementerian PUPR sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Permen PUPR No 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 adalah

Kementerian PUPR yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PUPR periode 2020 - 2024, maka Kementerian PUPR menetapkan Misi Kementerian yang merupakan rumusan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 - 2024. Adapun Misi Kementerian PUPR sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur PUPR;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, permukiman dan perumahan dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.





4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Direktorat PPISDA 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung dan percepatan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di tingkat pusat dan daerah;
- c. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d. Pengembangan sumber pendanaan dan skema pembiayaan infrastruktur sumber daya air yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan;
- e. Percepatan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada pembiayaan infrastruktur sumber daya air dengan mendorong partisipasi masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan terkait;
- f. Pendampingan Badan Usaha dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur sumber daya air; dan
- g. Memastikan dan mendorong peningkatan kualitas penyediaan dan operasional infrastruktur sumber daya air yang melalui skema KPBU.

Dalam menjalankan arah kebijakan 2020-2024 Direktorat PPISDA, diperlukan beberapa strategi dalam penentuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim KPBU untuk sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan KPBU pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, monitoring, dan evaluasi;
- b. Peningkatan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur sumber daya air yang akan dibiayai dengan skema KPBU dan terkait penerbitan dokumen izin lingkungan dan pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- c. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya terkait penentuan PJKP untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;





- d. Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pembangunan dan operasional infrastruktur sektor sumber daya air;
- e. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam rangka memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*;
- g. Melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk membahas tentang mekanisme dan konsep kerjasama pembelian tenaga listrik;
- h. Melakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya No. 55 tahun 2019 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyepakati perhitungan pendapatan dari listrik dan harga jual listrik PT. PLN (Persero) kepada masyarakat;
- i. Pemanfaatan bendungan multiguna baru yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- j. Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan yang terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air;
- k. Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pendayagunaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih, diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis; dan
- l. Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pengendalian daya rusak terutama dalam hal penanggulangan banjir yang dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis.





2.1.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai apa yang telah tertuang dalam pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Direktorat PPISDA menjalankan Sasaran Program, yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya.

Sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat PPISDA adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.

Adapun komposit dari Indikator – Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air:

1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan paket pembiayaan infrastruktur sumber daya air
2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur sumber daya air

Detail manual Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan persentase perhitungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang ikut berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal pembiayaan Infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 1Kontribusi Sasaran Kegiatan Direktorat PPISDA terhadap Sasaran Program 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
SP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi	IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator Kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan





		didukung Sistem Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah paket pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)
--	--	--	--	---

2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja antara pemberi amanah sebagai atasan langsung (dalam hal ini Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan) dengan penerima amanah yang akan mewujudkannya sekaligus sebagai pimpinan (dalam hal ini Direktur PPISDA). Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu mempertimbangkan sumber daya yang dikelola baik sumber daya manusia, sumber pendanaan, maupun sarana dan prasarana pendukung. Dokumen ini menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh





Direktur PPISDA selama satu tahun kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. Perjanjian Kinerja harus disusun dengan

memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator serta target kinerja. Indikator kinerja yang disusun antara lain harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan. Perjanjian Kinerja yang disusun harus dapat diturunkan dari tingkat eselon dua sampai kepada jenjang dibawahnya sehingga jenjang kinerja dapat diukur dengan jelas. Perjanjian Unit Kerja (tingkat Eselon II) disusun dengan orientasi outcome agar tercipta cascading dalam pengukuran kinerjanya.

Sesuai Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, PK mampu menunjukkan keberhasilan/kegagalan atas indikator kinerja utama (IKU). Selain itu, PK berguna sebagai dasar penilaian penghargaan dan/atau sanksi, penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP), pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kualitas perencanaan, dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap upaya perbaikan dan strategi peningkatan kinerja di periode selanjutnya.

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Pada dokumen Perjanjian Kinerja awal, tercantum satu sasaran kegiatan dan satu indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sedangkan, indikator kinerja kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan target 25%. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPISDA tahun 2024.

Tabel 2 2 Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPISDA Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.	%	100
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	25
Kegiatan	Anggaran	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rp 12.000.000.000,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2024 (Januari 2024)





Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan SAKIP, Perjanjian Kinerja dapat direvisi apabila terjadi kondisi seperti pergantian pejabat dan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran) serta perubahan prioritas yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada Tahun 2024, Direktorat PPISDA melakukan 3 (tiga) kali perubahan pada lembar Perjanjian Kinerja dan 5 (lima) kali revisi anggaran.

PK awal Direktorat PPISDA yang diterbitkan pada Januari 2024 mencantumkan target nilai Indikator Sasaran Strategis dan Sasaran Program masih ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis PUPR 2020 – 2024 dengan pagu alokasi anggaran Direktorat PPISDA TA 2024 adalah sebesar **Rp12.000.000.000,-**. Kemudian terdapat Revisi Anggaran I pada tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan pada kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) TA 2024 sebesar Rp 300.000.000,- yang akan direalokasikan kepada Direktorat Pelaksanaan Sistem dan Strategi dan Penyelenggaraan Pembiayaan.

Tabel 2.3 Revisi I PK Direktorat PPISDA Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Rekomendasi Kebijakan
Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	4 Kesepakatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan





Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rp 11.700.000.000,-

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2024 (Juli 2024)

Direktorat PPISDA melakukan Revisi PK II bulan Oktober 2024 berdasarkan pada:

- Kebutuhan penambahan Output Kegiatan baru pada KRO NSPK dengan judul Sub Komponen: Dukungan Penugasan Raperpres tentang “Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Melalui Optimasi Bendungan”;
- Perubahan Target pada KRO AEE Kemitraan khususnya pada RO AEE.001 Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan TA 2024 dari 4 (empat) kesepakatan menjadi 2 (dua) kesepakatan;
- Pagu alokasi anggaran PPISDA pada Revisi PK II ini sebesar **Rp11.500.000.000,-** ; dan
- Pergantian Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA.

Pada PK Awal, Direktur PPISDA sebagai pejabat tertinggi di Direktorat PPISDA menyatakan komitmen kinerja Unit Organisasi kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. Pada PK Awal jabatan Direktur PPISDA dipegang oleh Arvi Argyantoro.

Tabel 2 4 Revisi II PK Direktorat PPISDA Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Rekomendasi Kebijakan
Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan





NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
Layanan Perkantoran	1	Layanan
Kegiatan	Anggaran	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rp 11.500.000.000,-	

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2024 (Oktober 2024)

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Setelah menyusun PK Awal dan melakukan Revisi PK pertama dan kedua, selanjutnya di tahun 2024 Direktorat PPISDA akan melakukan Revisi PK akhir yang diterbitkan pada bulan Desember 2024. Pada PK akhir ini terjadi pengurangan pagu anggaran semula Rp 11.500.000.000,- menjadi Rp 11.075.700.000. Berikut merupakan PK Akhir Direktorat PPISDA tahun 2024.

Tabel 2 5 PK Akhir Direktorat PPISDA Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.	100%	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%	
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan
Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
Layanan Perkantoran	1	Layanan





Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rp 11.075.700.000,-

Sumber: Perjanjian Kinerja Akhir Direktorat PPISDA Tahun 2024 (Desember 2024)

2.2.3 Kronologi Perubahan PK

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Direktorat PPISDA telah melalui (3) tiga kali perubahan pada lembar Perjanjian Kinerja dan 3 (tiga) kali revisi anggaran. Perubahan dilakukan dengan merinci lebih detail terkait Indikator Kinerja yang ditargetkan hingga akhir tahun. Kronologis Revisi PK, termasuk penetapan IKK dan jumlah anggaran dapat dilihat melalui Tabel 2.5.

Tabel 2 6 Kronologis Revisi PK Direktorat PPISDA

No	Kronologis	Waktu Terbit	Pagu (dalam ribuan)	Keterangan
1.	PK Awal	Januari 2024	Rp 12.000.000	PK Awal sesuai dengan anggaran yang ada di DIPA awal
2.	PK Revisi I	Juli 2024	Rp 11.700.000	Pada Revisi PK I, memasukkan indikator kinerja ke dalam PK
3.	PK Revisi II	Oktober 2024	Rp 11.500.000	1. Perubahan Target Indikator Kinerja Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan dari 4 Kesepakatan menjadi 2 Kesepakatan 2. Adanya penambahan target pada <i>output</i> NSPK
4.	PK Akhir	Desember 2024	Rp 11.075.700	Self Blocking Anggaran dan Optimalisasi anggaran di akhir tahun

2.3 Metode Pengukuran

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai. Indikator Kegiatan (*output*) adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan tercapainya *output* kegiatan tersebut.





Metode pengukuran merupakan cara untuk mengidentifikasi besaran suatu capaian kinerja yang telah dilakukan oleh entitas Kementerian PUPR terhadap target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja. Pengukuran diperlukan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi tingkat kinerja entitas dilingkungan Kementerian PUPR sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan mutu kinerja ke depan.

Metode pengukuran yang ideal menjadi dasar untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya output dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur dan mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Indikator Sasaran

Tabel 2 7 Manual Indikator Kinerja Direktorat PPISDA

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indkator	Metode Perhitungan
SK 02 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dnegan target

Sumber: Revisi Renstra DJPI 2020 - 2024

Metode pengukuran yang digunakan pada perhitungan capaian kinerja Direktorat PPISDA tertera di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan





Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan cascading kinerja tersebut, target capaian Sasaran Kegiatan di tahun 2024 saling terintegrasi diantara unit kerja yang ada di DJPI sehingga mengakibatkan adanya *sharing* dalam pencapaian sasaran kegiatannya, dari 100% menjadi 25% per unit kerja (target 100% dibagi untuk 4 unit kerja). *Cascading* kinerja untuk Direktorat PPISDA berdasarkan Renstra diuraikan pada Tabel 2.7.





Tabel 2.8 Cascading Kinerja Direktorat PPISDA

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN										
Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2024	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Indikator	Output Kegiatan	Bobot Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target	50%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	30%
									Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	20%
									Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	30%
									Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	20%
						Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50%	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	35%
									NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	15%
									Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	30%
									Kinerja Pelaksanaan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	20%





2.4 Target Kinerja dalam Pemenuhan Renstra

Dalam rangka memenuhi ketercapaian sasaran program dan kegiatan, Direktorat PPISDA merencanakan *output* indikator dan menetapkan target per indikator setiap tahunnya, sebagai upaya terselenggaranya pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Rencana dan penetapan tersebut tertuang dalam Revisi Renstra Direktorat PPISDA TA 2020 - 2024.

Tabel 2 9 Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat PPISDA 2020 - 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR									11.042	22.000	47.290	43.125	44.050	167.507
1	Perencanaan dan Penganggaran dan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	4	2	3	2	2	13	1.894	1.200	3.100	4.725	5.150	16.069
	1 Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	1.368	600	600	700	800	4.086
	2 Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	1	1	7	525	600	2.500	4.025	4.350	12.000
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	1	1	6	946	2.100	600	2.400	2.400	8.446
	1 Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	1	1	6	946	2.100	600	2.400	2.400	8.446
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	3	5	4	2	2	16	3.603	11.550	31.900	23.600	23.600	94.253
	1 Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	1	1	7	2.803	1.500	14.400	20.000	14.000	52.703





PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR									11.042	22.000	47.290	43.125	44.050	167.507	
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	4	2	1	1	9	800	10.050	17.500	3.600	9.600	41.550	
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	457	700	1.000	1.000	1.200	4.357	
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	457	700	1.000	1.000	1.200	4.357	
5	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	1	2	2	4	4	13	1.469	4.000	5.090	5.500	5.800	21.859	
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokuem	2	1	2	2	1	8	980	1.000	2.440	2.600	2.750	9.770	
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Kesepakatan	1	2	2	4	4	13	489	3.000	2.650	2.900	3.050	12.089	
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	0	0	8	1.539	1.200	1.800	1.800	1.800	8.139	
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	0	0	8	1.539	1.200	1.800	1.800	1.800	8.139	
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	2	4	4	4	17	960	950	3.500	3.800	3.800	13.010	
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan	Laporan	3	2	4	4	4	17	960	950	3.500	3.800	3.800	13.010	





PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR									11.042	22.000	47.290	43.125	44.050	167.507
	Infrastruktur Sumber Daya Air													
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	0	0	3	176	300	300	300	300	1.376
	1 Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	0	0	3	176	300	300	300	300	1.376

Sumber: Revisi Renstra Direktorat PPISDA 2020 – 2024

Pada tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya untuk periode 2020-2024. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis yang signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat di Indonesia. Perubahan ini menyebabkan setiap Unor/Uker perlu menyusun revisi Renstra dan menetapkan kembali indikator kinerja utama (IKU) yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perubahan Renstra.

Direktorat PPISDA juga telah merevisi Dokumen Renstra 2020 – 2024 guna mendukung pencapaian target melalui langkah-langkah yang sistematis dan terkoordinasi. Perubahan yang mencolok terlihat pada target *output* untuk RO **Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan**, yang dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini.





Tabel 2 10 Perbandingan Target Output RO Proyek KPBUs Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA AWAL						TARGET RENSTRA REVISI					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Proyek KPBUs Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan												
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	2	1	2	2	2	9	2	1	2	2	1	8
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	1	2	2	4	4	13





2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Target yang harus dicapai Direktorat PPISDA pada Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan *baseline* atau dengan dasar capaian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 11 Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024 dibanding baseline tahun sebelumnya (2023)

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2023	TARGET PK 2024
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.	98,95%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	22,91%	25%

2.4.2 Target Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Renstra dan PK

Target pencapaian sasaran pada tahun 2024 per masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 12Sandingan Target Kinerja Rencana Strategis Direktorat PPISDA 2024 dengan Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	TARGET PK REVISI 2024
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%	25%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomedasi Kebijakan	1 Rekomedasi Kebijakan





Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	4 Kesepakatan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	0 NSPK	1 NSPK
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4 Dokumen	4 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah konsep yang mengacu pada kewajiban suatu instansi atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan oleh instansi pemerintah telah dimanfaatkan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Akuntabilitas Kinerja itu meliputi dua (2) aspek utama yaitu (1) Pertanggungjawaban atas hasil, merupakan hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan atas target kinerja yang relevan; (2) Pelaporan dan transparansi, dimana laporan kinerja tersebut harus jelas, jujur dan transparan mengenai penggunaan anggaran, sumber daya, serta pencapaian kinerja, sehingga publik dan pihak-pihak terkait dapat menilai kinerja tersebut.

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dapat dilakukan melalui upaya strategis yang terarah dan terimplementasi. Direktorat PPISDA telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan pelaporan dan pembahasan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten. Pada Tahun 2024 mekanisme pembahasan akuntabilitas evaluasi capaian kinerja dilakukan per triwulanan bersama mitra kerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dilakukan per bulan.

Penerapan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan sesuai standar dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, upaya peningkatan SDM juga dilakukan melalui mengikutkan pegawai untuk mengikuti workshop Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) berdasarkan Peraturan Terbaru pada 27 – 30 Maret 2024.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: PA0101-Ps/540.1 tanggal 21 Mei 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2023, implementasi AKIP Direktorat





PPISDA dikategorikan **A** dalam pengertian **Memuaskan** dengan pencapaian nilai 82,00, dalam pengertian bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP tersebut disebabkan dengan masih adanya kelemahan dalam beberapa komponen/subkomponen SAKIP. Berikut rincian per komponen penilaian AKIP Direktorat PPISDA seperti tertera pada tabel 3.1.

Tabel 3 1 Rincian Penilaian AKIP Direktorat PPISDA Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,70
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	82,00



Gambar 3 1 Rapat Persiapan Penyusunan LAKIN Direktorat PPISDA Tahun 2024

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang bertindak sebagai Evaluator Direktorat PPISDA menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada tahun 2024.

Dan pada tanggal 26 November 2024, Direktorat PPISDA juga telah menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Evaluasi AKIP TA 2023 di Ruang Rapat PPISDA.





Adapun beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut antara lain:

Tabel 3 2 Tindak Lanjut atas Rekomendasi AKIP Direktorat PPISDA Tahun 2023

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Perencanaan Kinerja	Perlu melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan (Renstra, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Perjanjian Kinerja, dan dokumen lainnya, sehingga tercapai dokumen perencanaan yang SMART	Direktorat PPISDA telah melakukan riviui terhadap dokumen perencanaan yang SMART
	Tetap melakukan perencanaan kinerja dengan melibatkan seluruh entitas unit kerja dari tingkat staf hingga tingkat Direktur	Direktorat PPISDA telah melakukan perencanaan kinerja dengan melibatkan seluruh entitas unit kerja.
Pengukuran Kinerja	Mendukung mekanisme pengumpulan data kinerja pada Direktorat PPISDA maka diperlukan SOP Pengukuran Data Kinerja/pengumpulan data kinerja tingkat Eselon II di tahun 2024	Direktorat PPISDA akan menyusun SOP Pengukuran Data Kinerja/pengumpulan data kinerja tahun 2024 untuk penyusunan LAKIN.
	<ul style="list-style-type: none">• Perlu dilakukan pembahasan penentuan standar penilaian capaian fisik• Diperlukan inovasi pengukuran capaian kinerja terhadap progress pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">• Belum ada standar penilaian realisasi dan target fisik dari Unit Eselon I yang dapat di adopt oleh Unit Kerja eselon II.• Untuk inovasi unit kerja, sulit dijadikan percontohan Nasional karena belum





	proyek KPB <i>Solicited</i> maupun <i>Unsolicited</i>	dijadikan atau diadopsi Kementerian/Lembaga Lainnya.
	Perlu berkoordinasi dengan Sesditjen dalam penerapan SE Menteri PUPR Nomor 23/SE/M/2023 terkait penerapan penyesuaian tukin berdasarkan kinerja	Direktorat PPISDA telah berkoordinasi dan telah menerapkan penyesuaian tukin berdasarkan kinerja yang ada.
Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none">• Perlu memastikan penyampaian laporan tidak melebihi batas maksimal sesuai dengan Permen PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 (5 hari kerja)• Mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada pengesahan dan penyampaian laporan kepada pimpinan dan esakip• Perlu mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam monitoring capaian kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat PPISDA telah menyampaikan laporan tidak melebihi batas waktu• Pencantuman tanggal, bulan dan tahun dalam setiap laporan belum dilakukan sepenuhnya. Masih ada beberapa laporan yang hanya mencantumkan bulan dan tahun• Dalam setiap penyusunan laporan monitoring capaian kinerja selalu melibatkan pimpinan dan telah didokumentasikan dengan baik.
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Lakin selanjutnya tetap disusun sesuai dengan Permen PUPR dan panduan penulisan laporan kinerja yang diterbitkan oleh BPIW	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen laporan kinerja Direktorat PPISDA selanjutnya tetap disusun sesuai dengan Permen PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 dan panduan penulisan laporan





	<ul style="list-style-type: none">• Perlu menyampaikan detail capaian kinerja selama periode Renstra pada Laporan Kinerja berikutnya.	<p>kinerja yang diterbitkan oleh BPIW</p> <ul style="list-style-type: none">• Direktorat PPISDA akan mendetailkan capaian kinerja selama periode Renstra pada Laporan Kinerja berikutnya.
	<ul style="list-style-type: none">• Unit kerja perlu untuk melakukan pembahasan terkait penyesuaian/reviu perencanaan kinerja secara berkala sekurangnya setiap tahun berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya;• Identifikasi Kendala dan permasalahan dalam pencapaian kinerja dengan pembahasan dan dapat dijadikan masukan dalam penyusunan/ penyesuaian rencana kerja tahun berikutnya• Menyusun strategi pelaksanaan kegiatan dan kinerja selama tahun berjalan dari identifikasi kendala/ permasalahan pencapaian kinerja.	<p>Direktorat PPISDA telah melaksanakan pembahasan terkait penyesuaian/reviu perencanaan kinerja secara berkala .Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pencapaian kinerja dan dijadikan masukan untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya beserta strategi pelaksanaannya.</p>
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Melaksanakan evaluasi AKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menindaklanjuti atas	Direktorat PPISDA akan tetap melaksanakan evaluasi AKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan





	rekomendasi yang diberikan secara real	Menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan secara real
	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong Direktorat PSSPP selaku koordinator AKIP DJPI untuk melakukan evaluasi AKIP menggunakan aplikasi (e-sakip) dan berkoordinasi dengan Biro PAKLN untuk segera menetapkan penggunaan e-sakip dalam evaluasi AKIP• Meningkatkan kapasitas sumber daya dengan memberikan pelatihan/workshop dan sertifikasi dari level pimpinan hingga staf.	<ul style="list-style-type: none">• Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat PSSPP secara internal dalam penggunaan aplokasi (e-SAKIP);• Beberapa pegawai Direktorat PPISDA akan diikutsertakan pelatihan Akuntabilitas.
	Monitoring capaian kinerja berkala (bulanan atau triwulanan) untuk mengidentifikasi kemampuan unit kerja dalam mencapai target yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya dapat dilakukan strategi untuk dapat memaksimalkan capaian kinerja tersebut.	Direktorat PPISDA telah melaksanakan Monitoring capaian kinerja berkala (bulanan atau triwulanan), namun perlu ditetapkan definisi yang jelas mengenai proyek KPBU yang siap dikerjasamakan/kesepakatan dalam perhitungan capaian kinerja





3.2 Capaian Kinerja

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 2020 – 2024, Direktorat PPISDA memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Dari IKSP ini kemudian diturunkan ke Renstra masing-masing Unit Kerja dan Indikator Kinerja PPISDA adalah Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Capaian kinerja Direktorat PPISDA tahun 2024, misalnya, dapat dilihat melalui perbandingan antara target yang ditetapkan dan realisasi dari indikator kinerja yang tercapai.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.	100%	99,33%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%	23,77%

Sumber: Cascading Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2024

Untuk mencapai nilai IKK tersebut, maka pada Perjanjian Kinerja tercantum target indikator kegiatan yang harus dicapai. Namun dalam pencapaian target IKK ditemui kendala yaitu terjadi perubahan DIPA dan PK yang menyebabkan penyesuaian terhadap realisasi anggaran dan pelaksanaan paket kegiatan. Langkah – langkah strategis yang ditempuh untuk mengatasi kendala adalah melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai PK dan penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan DIPA.

Pada PK Direktorat PPISDA, yang mengalami perubahan yang signifikan ada di bagian **Indikator Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap dikerjasamakan**. Proyek yang siap dikerjasamakan merupakan proyek yang telah menyelesaikan tahap penyiapan (FBC) dan siap untuk lelang (minimal Tahap Prakualifikasi). Perubahan





signifikan terhadap PK ini dikarenakan dinamisasi proses KPBU bidang Sumber Daya Air.

Diawal tahun 2024, Direktorat PPISDA membuat target 4 (proyek) KPBU yang siap dikerjasamakan dengan indikator 4 (empat) kesepakatan sesuai dengan target DIPA awal. Proyek yang dijadikan target adalah:

Tabel 3 4 Target Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan

No	Nama Proyek	Nilai Investasi (dalam rupiah)
1.	Bendungan Merangin	Rp 7.850.000.000.000
2.	DI Lhok Guci	Rp 4.160.000.000.000
3.	PLTM Karalloe	Rp 123.000.000.000
4.	Penyediaan Infrastruktur PLTM Way Sekampung	Rp 115.900.000.000

Sumber: Lampiran PK bulan Januari 2024

Berdasarkan disposisi Menteri PUPR Nomor Agenda 3995/IM/23 tanggal 8 Desember 2023, Proyek PLTM Karalloe dan Proyek Penyediaan Infrastruktur PLTM Way Sekampung dihentikan dan proyek tersebut masuk kedalam obyek Raperpres Penugasan. Untuk itu, Direktorat PPISDA kemudian melakukan revisi pada lampiran PK pada bulan Juli 2024, dengan menargetkan 4 (empat) proyek yang dinilai berpotensi sebagai proyek yang siap dikerjasamakan.

Tabel 3 5 Target Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan

No	Nama Proyek	Nilai Investasi (dalam rupiah)
1.	Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komerling berdasarkan Prinsip Syariah	Rp 1.650.000.000.000
2.	Bendungan Bodri	Rp 2.073.000.000.000
3.	Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,41 MW pada Bendungan Leuwikeris	Rp 225.380.000.000
4.	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada bendungan Tiga Dihaji	Rp 115.900.000.000

Sumber: Lampiran PK bulan Juli 2024

Berdasarkan target Renstra, untuk tahun 2024 Direktorat PPISDA hanya menargetkan 2 (dua) kesepakatan. Untuk itu, berdasarkan surat No.30/ND/Pa/2024 tanggal 18 Maret 2024 meminta dilakukan Revisi DIPA, agar sinkron antara target Renstra dan target DIPA. Selain itu, dalam rangka penyusunan Raperpres Penugasan BUMN,





Direktorat PPISDA juga mengusulkan penambahan RO NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (berdasarkan surat Direktur PPISDA No. Ku 0601-Pa/32 tanggal 27 Maret 2024).

Revisi PK kedua dilakukan di Bulan Oktober, dengan penyesuaian target menjadi 2 kesepakatan dan dengan adanya perubahan posisi pada jabatan Eselon II. Dan proyek yang menjadi target adalah:

Tabel 3 6 Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan

No	Nama Proyek	Nilai Investasi (dalam rupiah)
1.	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada bendungan Tiga Dihaji	Rp 920.400.000.000
2.	Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komerling berdasarkan Prinsip Syariah	Rp 1.650.000.000.000

Sumber: Lampiran PK Direktorat PPISDA bulan Oktober 2024

Dan pada akhir tahun 2024, PK Direktorat PPISDA mengalami revisi yang ketiga, namun perubahan tidak terjadi pada target output melainkan hanya pada pagu anggaran yang telah disesuaikan dengan Revisi DIPA terakhir.

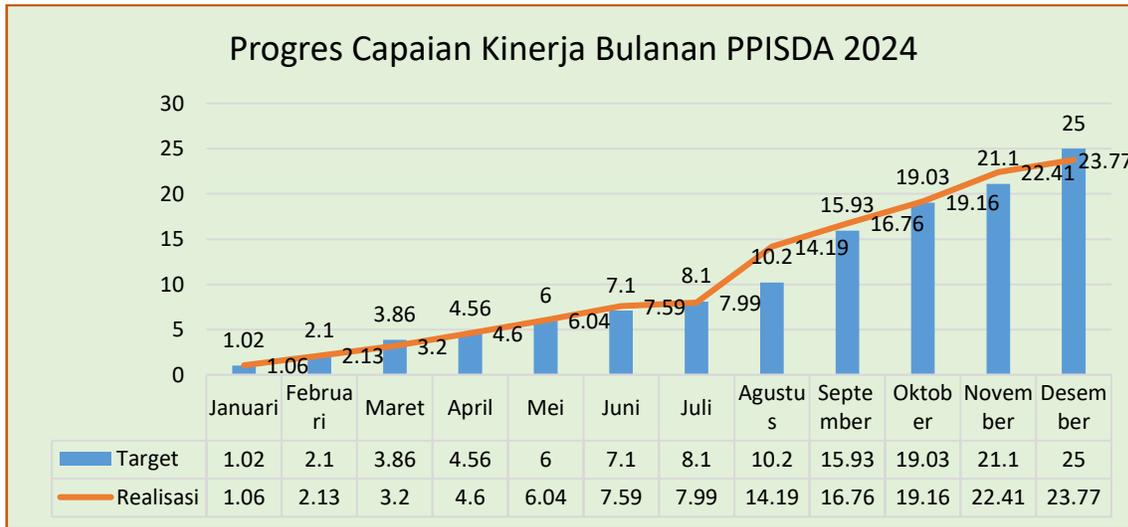
Pengukuran capaian kinerja Direktorat PPISDA dilakukan secara *cascading* berdasarkan metode perhitungan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja berdasarkan target pada Rencana Strategis dengan kinerja yang telah dicapai Direktorat PPISDA.

Kronologis capaian kinerja Direktorat PPISDA setiap bulan disandingkan dengan target capaiannya selama tahun anggaran 2024 adalah seperti yang tertera pada gambar 3.2 dibawah ini.





Gambar 3 2 Grafik Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2024



Cascading adalah proses penurunan struktur program hingga ke tingkat paket kegiatan secara sistematis. Proses ini dimulai dengan Sasaran Strategis yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Program. Setiap Sasaran Program selanjutnya dibagi menjadi beberapa Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yang kemudian diturunkan lagi menjadi Sasaran Kegiatan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Sasaran Kegiatan dan IKSK tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), yang pada gilirannya diuraikan menjadi Rincian Output (RO) beserta Indikator Rincian Output. Selanjutnya, Rincian Output dan Indikator RO ini diturunkan menjadi Paket Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan jenis indikator Capaian kinerja Direktorat PPISDA untuk tahun 2024 didukung oleh 4 KRO yaitu: Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana (ABF), Kemitraan (AEE), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (EBD). Pencapaian output pada masing – masing KRO yang diselesaikan Direktorat PPISDA sepanjang tahun 2024 adalah seperti yang tercantum pada tabel 3.7 dibawah ini.





Tabel 3 7 Capaian Output Direktorat PPISDA Tahun 2024

KRO	RO	Output
KEBIJAKAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1. Renstra 2025 – 2029 2. Renja 2025 3. Dokumen Penganggaran
	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen Pra Studi Kelayakan DI Komering
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen Pra Studi Kelayakan DI Lhok Guci, Aceh
	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1. Dokumen KSPI Proyek KPBU DI Komering 2. Draft Pengajuan Penjaminan 3. Draft Laporan Akhir Studi Kelayakan Proyek KPBU Bendungan Merangin 4. Hasil evaluasi konsorsium dan nilai investasi
KEMITRAAN	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1. Surat Pemenang Lelang (Letter of Award) Proyek KPBU PLTM Bintang Bano 2. Surat Pemenang Lelang (Letter of Award) Proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji 3. Surat Persetujuan untuk melanjutkan proses Proyek KPBU PLTM Bener 4. Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Proyek KPBU PLTM Bintang Bano 5. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembentukan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji





KRO	RO	Output
		<ol style="list-style-type: none">6. Surat Permohonan Proses Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Proyek KPBU PLTM Bintang Bano7. Surat Permohonan Proses Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji8. Laporan Penjaminan Mutu Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji9. Rancangan Dokumen PKS Proyek KPBU Bendungan Bodri10. Rancangan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU Daerah Irigasi Lhok Guci11. Rancangan Dokumen Pengadaan dan Rancangan Perjanjian KPBU PLTM Leuwikeris
NSPK	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Raperpres tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Melalui Optimasi Bendungan
LAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Monev bulanan Direktorat PPISDA2. Buku profil risiko proyek KPBU SDA sektor Bendungan3. Buletin PPISDA4. Laporan Kinerja Direktorat PPISDA5. Laporan Tahunan 2024

Secara keseluruhan nilai IKK Direktorat PPISDA tahun 2024 berdasarkan Cascading perhitungan Kinerja Direktorat PPISDA tahun 2024 yang telah disusun sedemikian rupa guna mencapai target *output* yang telah ditetapkan, tercermin pada tabel 3.8 dibawah berikut.





Tabel 3.8 Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKK	JENIS INDIKATOR	KRO	RINCIAN OUPUT	PAKET KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET DIPA	TARGET PK	TARGET	CAPAIAN RO DESEMBER 2024	CAPAIAN IKK DESEMBER 2024	
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	KEBIJAKAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyusunan Rencana Strategi 2025-2029 dan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA.2025	Rekomendasi Kebijakan	1	1	25%	30%	30%	23.77%	
				Penyusunan Identifikasi dan Profil Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1					
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2024	Rekomendasi Kebijakan	1	1		20%			20%
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyusunan Final Business Case Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2024	Rekomendasi kebijakan	1	1		30%			30%
				Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air	Rekomendasi kebijakan	1	1					
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2024	Rekomendasi Kebijakan	1	1		20%			20%
	Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur	KEMITRAAN	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	Penyiapan Tahapan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2024	Dokumen	1	1	35%	25.2%			
				Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2024	Kesepakatan	0	0					





SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKK	JENIS INDIKATOR	KRO	RINCIAN OUPUT	PAKET KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET DIPA	TARGET PK	TARGET	CAPAIAN RO DESEMBER 2024	CAPAIAN IKK DESEMBER 2024
Sumber Daya Air (%)				Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Lainnya TA. 2024	Kesepakatan	4	2				
		NSPK	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Bendungan untuk mendukung energi terbarukan	NSPK	0	1		15%	15%	
		LAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan dan Penyiapan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2024	Laporan	1	1	30%	30%		
				Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2024	Laporan	1	1				
				Penyusunan Perkembangan Pelaksanaan Proyek KPBU Sumber Daya Air Tahun 2024 Melalui Media Informasi	Laporan	1	1				
				Penyusunan Profil Risiko Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2024	Laporan	1	1				
		Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2022	Laporan	1	1	20%	20%			





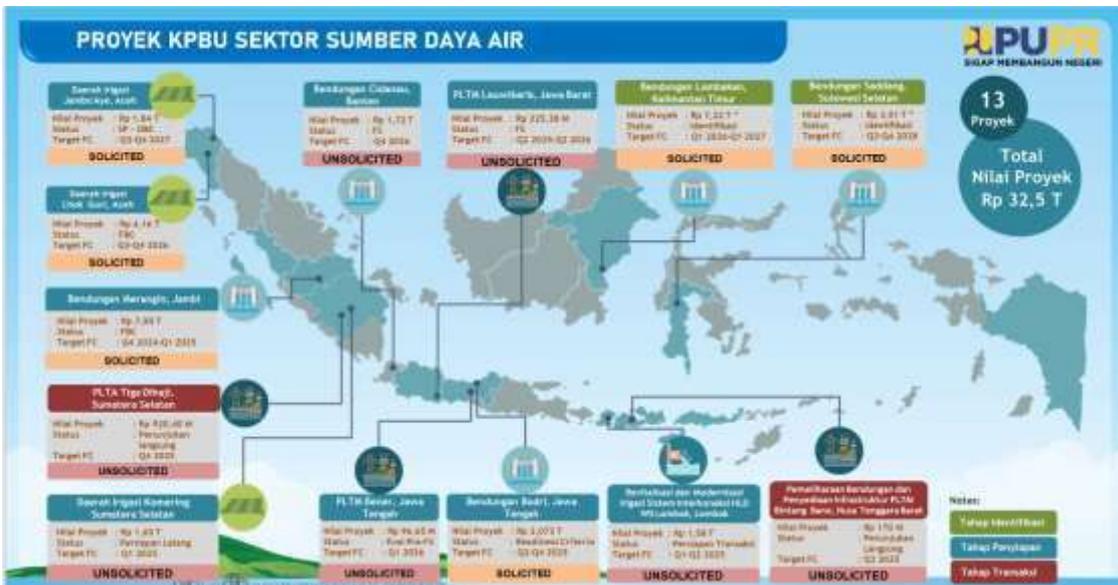
Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa capaian IKK Direktorat PPISDA hanya mencapai 23, 77% dari target IKK yang telah ditentukan sebelumnya pada Perjanjian Kinerja yaitu 25%. Adapun nilai capaian kinerja dibawah target disebabkan belum tercapainya target *output* pada KRO Kemitraan (AEE) dengan *cut off* target **Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan** (minimal tahap prakualifikasi). Direktorat PPISDA hanya tercapai 1 (satu) dari 2 (dua) kesepakatan yang telah ditargetkan dalam DIPA. Proyek yang di targetkan guna mencapai 2 (dua) Kesepakatan ini adalah:

Tabel 3 9 Target output Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan

No	Nama Proyek	Nilai Investasi
1.	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji	Rp 920.399.742.833,00
2.	Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp 1.650.000.000.000,00

Sumber: Lampiran PK PPISDA Revisi Desember 2024

Dari 2 (dua) proyek yang ditargetkan ini, yang tercapai adalah Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji dengan status proyek per Desember 2024 adalah Pra Kualifikasi (tahap Transaksi). Sedangkan untuk Proyek KPBU Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah belum tercapai dikarenakan proyek tersebut masih dalam proses penyesuaian dan peningkatan nilai CAPEX sebagai akibat perubahan konsorsium pada Badan Usaha sehingga masih perlu dilakukan evaluasi dan kesepakatan atas usulan perubahan nilai CAPEX dan melakukan konfirmasi ulang final AP.



Selain dikarenakan ketidaktercapaian target output pada KRO Kemitraan tersebut, rendahnya capaian dari target IKK juga dikarenakan adanya kendala pada beberapa





proyek KPBU yang ditangani oleh Direktorat PPISDA. Berikut ini progres pelaksanaan KPBU sektor Sumber Daya Air pada tahun 2024 yaitu:

Tabel 3 10 Progres Pelaksanaan Proyek KPBU sektor SDA

NO	PROYEK	TAHAPAN KPBU	PROGRES TAHUN 2024
SOLICITED			
1.	Bendungan dan PLTA Merangin, Jambi	Penyiapan	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat PPISDA telah melakukan pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan Kementerian Keuangan (BA Ruang Lingkup) untuk kelanjutan penyusunan Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan.• Penyampaian proyek KPBU Merangin pada PPP Book masih menunggu dasar pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada KPBU Sektor SDA.• Draft revisi RTRW saat ini sedang dalam tahap persetujuan DPRD, BWS Sumatera VI perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
2.	Bendungan Bodri, Jawa Tengah	Penyiapan	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat PPISDA akan menyampaikan usulan Konfirmasi Final AP kepada Kemenkeu setelah dilakukan revisi FBC dan menghitung ulang besaran nilai AP• DJPI sedang dalam proses koordinasi dengan Ditjen SDA dan Biro Hukum, SekJend terkait pernyataan





			<p>tertulis bahwa kegiatan Operasi dilaksanakan oleh Pemerintah sedangkan kegiatan Pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none">• Akan dilakukan pengusulan kembali proyek-proyek yang akan masuk PPP book pada awal tahun 2025.• Direktorat PPISDA berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juana terkait penyesuain timeline pengadaan tanah dan pelepasan kawasan hutan.
3.	Daerah Irigasi Jambo Aye, Aceh	Penyiapan	Telah diselenggarakan Market Sounding Proyek KPBU DI Jambo Aye pada 10 Desember 2024.
4.	Daerah Irigasi Lhok Guci, Aceh	Penyiapan	Telah dilakukan penyelesaian Laporan Akhir Penyusunan FBC pada tanggal 31 Desember 2024.
5.	Bendungan lambakan, Kalimantan Timur	Perencanaan	Direktorat PPISDA sedang menyusun project digest agar penyusunan Prastudi Kelayakan dapat diusulkan dibiayai menggunakan Loan
6.	Bendungan Saddang, Sulawesi Selatan	Identifikasi	Penyusunan SP+ dan Prastudi Kelayakan tidak memperoleh alokasi anggaran pada pagu indikatif TA 2025.
UNSOLICITED			
1.	Daerah Irigasi Komeriing, Sumatera Selatan	Penyiapan	Apabila CTP tidak dapat dikeluarkan oleh PT PII, maka pelaksanaan KPBU Unsolicited DI Komeriing tidak





			menggunakan penjaminan PT PII. Terdapat surat dari KNEKS kepada Menteri PUPR mengenai penyelesaian isu OP.
2.	PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	Penyiapan	Konsorsium Calon Pemrakarsa saat ini sedang melakukan penyesuaian Dokumen Studi Kelayakan dengan target penyelesaian pada 17 Januari 2025.
3.	PLTM Bener, Jawa Tengah	Penyiapan	PT RAIN selaku calon pemrakarsa akan melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) dalam rangka memastikan PLTM Bener masuk dalam kuota RUPTL
4.	Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS lombok, Lombok	Penyiapan	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dengan BWS Nusa Tenggara II dan Bagian BMN, Ditjen SDA terkait daftar BMN yang akan diinput ke dalam aplikasi SIMAK BMN Versi II• Akan dilakukan pengusulan ulang proyek-proyek yang akan masuk PPP book pada awal tahun 2025• Direktorat PPISDA melakukan koordinasi dengan badan usaha pemrakarsa mengenai penyesuaian ruang lingkup proyek
5.	PLTA Tiga Dihaji, Sumatera Selatan	Transaksi	<ul style="list-style-type: none">• Saat ini proses RUPTL 2024-2033 sedang dalam tahap harmonisasi antara PT PLN (Persero) dengan Kemen ESDM, Kemen BUMN dan Kemenkeu.





			<ul style="list-style-type: none">• Konsorsium Calon Pemrakarsa saat ini sedang melakukan penyesuaian Dokumen Studi Kelayakan dengan target penyelesaian Januari 2025
6.	Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat	Transaksi	<ul style="list-style-type: none">• Menindaklanjuti Surat PT Brantas Abipraya (Persero) No: 468/D/UM/XI/2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penandatanganan PJB L PLTM Bintang Bano 6,3 MW pada tanggal 28 November 2024, maka pelaksanaan Penandatanganan PJB L antara BUP dan PT PLN (Persero) diperpanjang sampai 30 Juni 2025. Sehingga pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian KPBU dapat dilaksanakan paling lambat 30 Juli 2025.
7.	Bendungan Cidanau, Banten	Penyiapan	DJPI telah bersurat kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk proses pembangunan bendungan Cidanau menjadi perizinan berusaha.





Gambar 3 3Tangkapan Rapat Moneyv Quartal IV dan Persiapan Penyusunan Lakin 2024



3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1 Analisi Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Kinerja Direktorat PPISDA selama periode 2020 – 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3 11 Perbandingan Kinerja Tahun 2020 - 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya					
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif					
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan					
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air					
TARGET	25 %				
REALISASI	24,56%	24,25%	25,00%	22,91%	23,77%
KINERJA	98,24%	97,00%	100%	87,64%	95,08%





3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) dimana salah satunya adalah “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Untuk sektor infrastruktur sumber daya air memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan penyediaan infrastruktur tampungan air multiguna dan berkelanjutan, dan pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta peternakan, tambak dan pertanian non padi.

Dalam RPJMN 2020 – 2024 terdapat 2 (dua) proyek prioritas strategis (*Major Project*) sektor sumber daya air yaitu:

1. Pembangkit Listrik 27.000 MW dan Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA

Manfaat proyek ini adalah (1) Berlanjutnya penyelesaian target program 35.000 MW; (2) Mendukung target EBT pada bauran primer pada akhir tahun 2024 sebesar 18.5%; (3) Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024; (4) Penurunan emisi CO₂ pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO₂ pada 2024; (5) Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024; dan (6) Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional. Meskipun tidak ada indikasi pendanaan KPBU yang spesifik, namun untuk proyek ini diindikasikan dengan pendanaan sebesar Rp 1.121 T dari Badan Usaha, proyek ini merupakan investasi yang diharapkan dapat menghasilkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

2. 18 Waduk Multiguna

Proyek ini memiliki manfaat: tersedianya pasokan air baku waduk 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2,438 MW, tersedianya pasokan air di 51 Daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI. Dengan indikasi pendanaan yang mencapai Rp 24,0 T melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), proyek ini merupakan investasi signifikan yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan.

Kedua proyek prioritas strategis ini menandakan keseriusan Pemerintah untuk mengatasi tantangan infrastruktur sumber daya air di Indonesia. Peningkatan pasokan





listrik dan air tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga merupakan fondasi penting bagi pembangunan keberlanjutan. Dalam menjalankan kedua proyek ini pasti ada tantangan tersendiri, termasuk dalam hal koordinasi antar lembaga, penyesuaian dengan kondisi lokal, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Oleh karena itu, suksesnya pelaksanaan proyek ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada manajemen proyek yang efektif, kerja sama antara pemerintah dan swasta, serta dukungan masyarakat.

Pencapaian realisasi KPBU Direktorat PPISDA dalam tahap investasi dari tahun 2020 hingga 2024, belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur sektor sumber daya air di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari total investasi yang telah direalisasikan melalui serangkaian proyek yang dilaksanakan hanya mencapai Rp 8.393.955.483.000 dari target indikasi investasi KPBU berdasarkan RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan sebesar Rp 17.393.537.929.000.

Tabel 3 12 Capaian Proyek SDA yang Siap Dikerjasamakan Periode 2020 - 2024

No.	Target Renstra		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Nama Proyek	Nilai investasi
Tahun 2020				
1.	1	Rp 4.787.000.000.000	-	-
Tahun 2021				
2.	2	Rp 3.691.411.000.000	-	-
Tahun 2022				
3.	2	Rp 1.203.486.000.000	1. Bendungan Bodri 2. Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano 3. Daerah Irigasi Komerling 4. Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok – NTB 5. PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji – Sumsel	Rp 7.113.956.483.000
Tahun 2023				
4.	5	Rp 5.141.240.929.000	1. PLTM Bendungan Jenelata-SulSel 2. PLTM Leuwikeris	Rp 359.599.000.000
Tahun 2024				
5.	2	Rp 2.570.400.000.000	PLTA Tiga Dihaji, SumSel	Rp 920.400.000.000
TOTAL		Rp 17.393.537.929.000		Rp 8.393.955.483.000

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2020-2024





Pada tahun 2020 dan 2021, belum ada satupun proyek yang masuk dalam tahap investasi KPBU dikarenakan untuk mencapai satuan Kesepakatan tersebut, *cut off* pada tahun tersebut adalah minimal masuk tahap Lelang. Sementara dalam menjalankan proses KPBU sektor Sumber Daya Air guna mencapai target jangka menengah ini, terdapat beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi diantaranya:

1. Alokasi anggaran pada Renstra 2020-2024 tidak sama dengan yang ada pada DIPA selaku pagu anggaran yang akan dipakai untuk pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, hal ini yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak dalam mencapai target yang ada di renstra. Rencana kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan, disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada pada DIPA.
2. Perubahan kebijakan hampir di setiap tahun berjalan anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian peraturan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi target dan realisasi di tahun berjalan tersebut
3. Dokumen Renstra 2020-2024 setelah dilakukan revisi target pada tahun 2024, berdampak semakin bertambahnya target output pada RO **Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan**, dimana sebelum revisi target output sebanyak 9 Kesepakatan, namun setelah di revisi mencapai 13 Kesepakatan.

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Dalam rangka penajaman dan penguatan tugas dan fungsinya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk unit organisasi yang dituangkan dalam Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai salah satu organisasi, mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Sedangkan Direktorat PPISDA mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Perbandingan kinerja dengan standar nasional dilaksanakan dengan membandingkan realisasi anggaran Direktorat PPISDA dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Kesamaan antara Direktorat PPISDA dengan Ditjen SDA yaitu bertugas dalam pelaksanaan sektor sumber daya air dalam mendukung program kementerian.





Realisasi keuangan Ditjen SDA pada diakhir tahun 2024 sebesar 87,40% yaitu sebesar Rp Rp43,70 Triliun. Sedangkan, berdasarkan iemonitoring PUPR tanggal 31 Desember 2024, realisasi keuangan Direktorat PPISDA sebesar 95,22% atau senilai Rp10.55 Milyar.

Tabel 3 13 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat PPISDA

Unit Organisasi/Kerja	PAGU	Realisasi
Ditjen SDA	Rp 50.003.286.251.000	87,40%
Direktorat PPISDA	Rp. 11.075.700.000	95,22%

Sumber: Laporan Kinerja DJSDA dan Direktorat PPISDA

Berdasarkan anggaran pada tahun 2024, terdapat perbandingan pada alokasi dan realisasi anggaran antara Direktorat PPISDA dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Perbedaan alokasi anggaran disebabkan oleh adanya perbedaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Pembiayaan proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menggunakan APBN dan untuk Direktorat PPISDA menggunakan Pembiayaan lain seperti skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

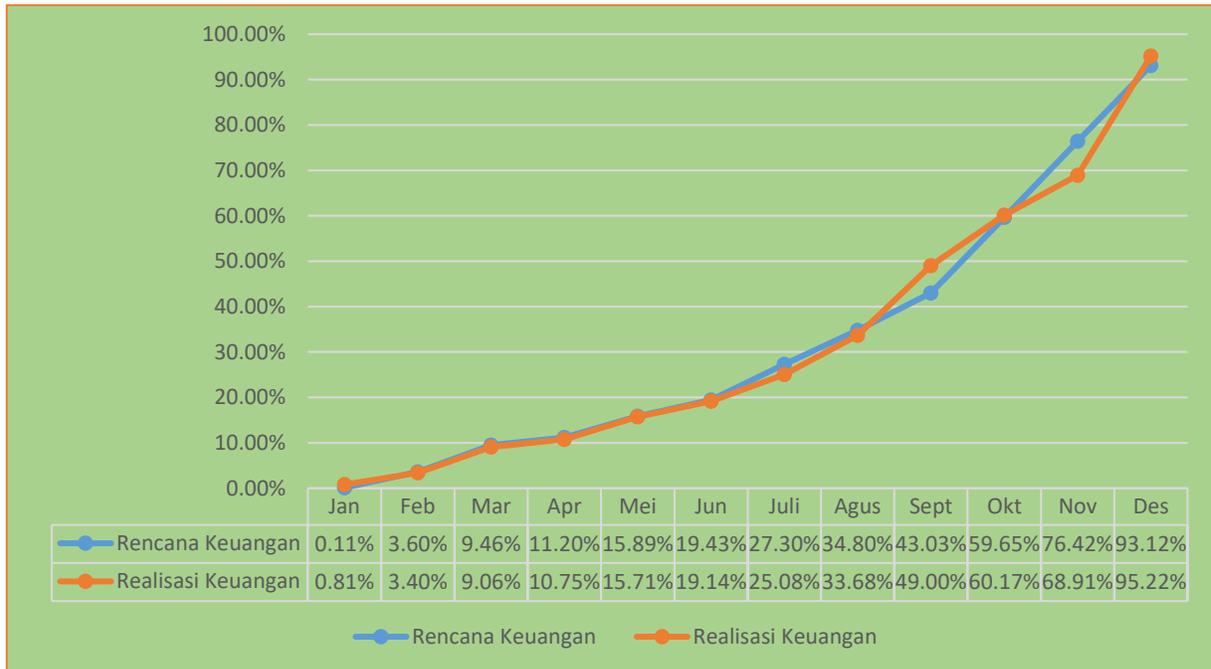
3.4 Analisis Realisasi Anggaran

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki total anggaran awal sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), dengan 5 (lima) kali perubahan pagu anggaran sepanjang tahun 2024 dimana perubahan terakhir berdasarkan DIPA Revisi ke-13 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2024 tanggal 02 Desember 2024, total pagu anggaran Direktorat PPISDA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 11.075.700.000,- (sebelas milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Berdasarkan iemonitoring PUPR tanggal 31 Desember 2024, realisasi keuangan Direktorat PPISDA sebesar 95,22% atau senilai Rp10.546.197.000,00 (sepuluh milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target yang direncanakan pada awal tahun dengan realisasi.





Gambar 3.4 Sandingan Target dan Realisasi Keuangan Direktorat PPISDA TA. 2024



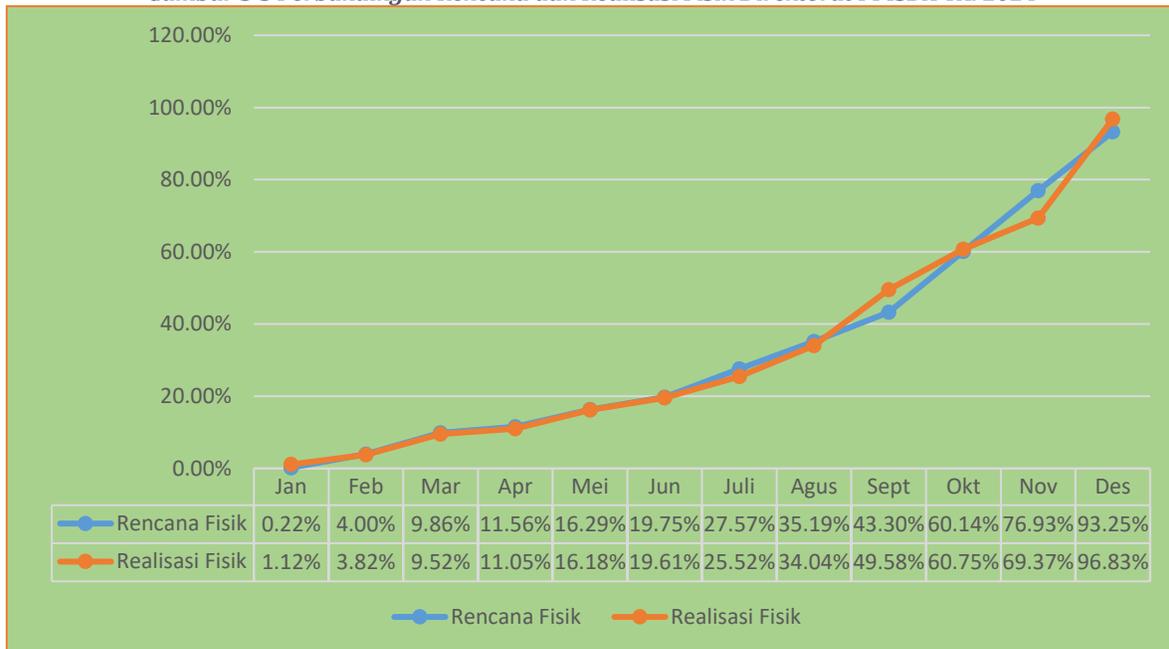
Sumber: e-Monitoring tanggal 31 Desember pk.16.00 WIB

Sementara realisasi fisik berdasarkan data e-Monitorng status 31 Desember 2024 pk. 16.00 WIB sebesar 96,83% sehingga terdapat deviasi sebesar +3,58% dari rencana awal 93,25%. Perbandingan rencana dan realisasi setiap bulannya selama tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini.





Gambar 3.5 Perbandingan Rencana dan Realisasi Fisik Direktorat PPISDA TA. 2024



3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan tahun anggaran 2024 Nomor: DIPA-033.16.1.631003/2024, Pagu awal anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah), terdiri dari 6 Output kegiatan yaitu: Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA, Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan, dan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA serta Layanan Perkantoran. Berikut ini tabel rincian awal anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama tahun anggaran 2024 (Rincian Output):





Tabel 3 14 Rincian Output berdasarkan DIPA Awal

Kode KRO	KRO	RO	Satuan RO	Pagu DIPA	
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	1.100.000.000,00
		Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	1.590.000.000,00
		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	3.250.000.000,00
		Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	600.000.000,00
AEE	Kemitraan	Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	Rp	3.500.000.000,00
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauandan Evaluasi	Laporan	Rp	960.000.000,00
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Layanan	Rp	1.000.000.000,00
Total Pagu Anggaran Dit PPISDA TA 2024				Rp	12.000.000.000,00

Sumber: DIPA Awal (24 November 2023)

Revisi DIPA I

Berdasarkan surat DIPA tanggal 2 Mei 2024 perihal Revisi DIPA ke 03, Direktorat PPISDA mengalami pengurangan pagu sebesar Rp 300.000.000,00 guna kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) TA 2024 yang akan di realokasi ke Direktorat Pelaksanaan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (PSSPP), sehingga total pagu menjadi Rp11.700.000.000,00.

Perubahan anggaran terjadi pada 3 (tiga) RO yaitu:

1. RO Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA pagu awal sebesar Rp1.590.000.000,00 menjadi Rp 1.490.000.000,00.
2. RO Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA sebesar Rp 123.720.000,00





dengan pagu awal Rp 750.000.000,00.

- RO Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan dengan pagu awal Rp 800.000.000,00 menjadi Rp 723,720,000,00.

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3 15 Revisi DIPA I Direktorat PPISDA TA.2024

Kode KRO	KRO	RO	Satuan RO	Pagu DIPA	
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	1.100.000.000,00
		Studi Pendahuluan Pembiayaan InfrastrukturSDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	1.490.000.000,00
		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	3.126.280.000,00
		Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	600.000.000,00
AEE	Kemitraan	Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	Rp	3.423.720.000,00
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauandan Evaluasi	Laporan	Rp	960.000,000,00
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Layanan	Rp	1.000.000,000,00
Total Pagu Anggaran Dit PPISDA TA 2024				Rp	11.700.000.000,00

Sumber: Revisi DIPA ke 03 tanggal 2 Mei 2024

Revisi DIPA II

Berdasarkan surat Revisi DIPA VI tertanggal 9 Agustus 2024, DIPA Direktorat PPISDA mengalami perubahan pada RO Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan yaitu mengubah target pencapaian dari 4 Kesepakatan menjadi 2 Kesepakatan. Selain itu pada revisi kali ini, Direktorat PPISDA menambah target pada RO AEE.001 yaitu RO NSPK





Pembiayaan Infrastruktur SDA. Data lengkap dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3 16 Tabel Revisi DIPA II Direktorat PPISDA TA. 2024

Kode KRO	KRO	RO	Satuan RO	Pagu DIPA	
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	1.100.000.000,00
		Studi Pendahuluan Pembiayaan InfrastrukturSDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	1.490.000.000,00
		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	3.126.280.000,00
		Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	600.000.000,00
AEE	Kemitraan	Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	Rp	3.023.720.000,00
AFA	NSPK	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	Rp	400.000.000,00
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauandan Evaluasi	Laporan	Rp	960.000,000,00
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Layanan	Rp	1.000.000,000,00
Total Pagu Anggaran Dit PPISDA TA 2024				Rp	11.700.000.000,00

Sumber: Revisi DIPA ke 6 tanggal 9 Agustus 2024

Revisi DIPA III

Berdasarkan surat DIPA Revisi 08 tanggal 30 September 2024, pagu Direktorat PPISDA mengalami perubahan sebesar Rp200.000.000,00 menjadi Rp 11.500.000.000,00. Nilai tersebut terdiri dari:

1. Pengurangan pagu pada RO AEE Proyek KPBU SDA yang Siap dikerjasamakan sebesar Rp100.000.000,00 semula Rp 3.023.720.000,00 menjadi Rp2.923.720.000,00.





2. Pengurangan pagu pada RO NSPK sebesar Rp100.000.000,00 semula Rp400.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00.

Revisi DIPA IV

Pada tanggal 16 Oktober 2024, pagu DIPA Direktorat PPISDA mengalami revisi pada RO Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA sebesar Rp424.300.000,00 dari anggaran semula Rp 2.500.000.000,00 menjadi Rp2.075.700.000,00. Perubahan ini dikarenakan mengikuti nilai paket kontraktual.

Revisi DIPA V

Pada tanggal 2 Desember 2024, DJPI melakukan revisi DIPA ke 13. Berkenaan dengan itu, Direktorat PPISDA pun mengalami perubahan nilai pagu pada beberapa RO walaupun total pagu tetap sebesar Rp11.075.700.000,00. Komposisi pagu setelah revisi DIPA ini dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini.

Tabel 3 17 Revisi DIPA V Direktorat PPISDA TA 2024

Kode KRO	KRO	RO	Satuan RO	Pagu DIPA
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp 1.206.600.000,00
		Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp 1.710.000.000,00
		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp 2.695.380.000,00
		Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp 600.000.000,00
AEE	Kemitraan	Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	Rp 2.603.720.000,00
AFA	NSPK	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	Rp 300.000.000,00
EBD	Layanan Manajemen	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	Rp 960.000.000,00





	Kinerja Internal				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Layanan	Rp	1.000.000,000,00
Total Pagu Anggaran Dit PPISDA TA 2024				Rp	11.075.700.000,00

Sumber: Revisi DIPA ke 13 tanggal 2 Desember 2024

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2024

Realisasi anggaran berdasarkan *Integrated e-Monitoring Online* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 31 Desember 2024, realisasi keuangan Direktorat PPISDA sebesar 95,22% atau sejumlah Rp. 10.546.196.000,- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar 98,82% dan realisasi fisik sebesar 96,83%. Rincian realisasi anggaran sampai bulan Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 3 18 Rincian Realisasi Anggaran Direktorat PPISDA Tahun 2024

No.	Kode	Paket Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	REALISASI		
				Rp (Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1.	4197.ABF.001.051.A	Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 dan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025	700,000	699,903	99.99	100.00
2.	4197.ABF.001.052.A	Penyusunan Identifikasi dan Profil Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	506,500	506,125	99.91	100.00
3.	4197.ABF.002.051.A	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sektor SDA TA. 2024	1,710,000	1,709,713	99.98	100.00
4.	4197.ABF.003.051.A	Penyusunan Final Business Case Proyek KPBU Daerah Irigasi Lhok Guci, Aceh	2,075,700	2,075,700	100.00	100.00
5.	4197.ABF.003.051.B	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Studi Kelayakan Proyek KPBU Unsolicited Infrastruktur Sumber Daya Air TA 2024	619,680	618,298	99.78	100.00
6.	4197.ABF.004.051.A	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2024	600,000	599,695	99.95	100.00
7.	4197.AEE.001.051.A	Penyiapan Tahapan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2024	1,100,000	968,578	88.05	100.00
8.	4197.AEE.001.052.A	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2024	373,720	328,900	88.01	89.00





9.	4197.AEE.001 .052.B	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Lainnya TA. 2024	1,130,000	1,000,501	88.54	89.00
10.	4197.AFA.001 .051.A	NSPK Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Bendungan untuk mendukung energi terbarukan	300,000	111,122	37.04	38.00
11.	4197.EBD.953 .051.A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan dan Penyiapan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2024	240,000	222,981	92.91	100.00
12.	4197.EBD.953 .051.B	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2024	240,000	227,627	94.84	100.00
13.	4197.EBD.953 .051.C	Penyusunan Perkembangan Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Tahun 2024 Melalui Media Informasi	240,000	239,825	99.93	100.00
14.	4197.EBD.953 .051.D	Penyusunan Profil Risiko Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2024	240,000	238,828	99.51	100.00
15.	4194.EBA.994 .002.M	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPISDA	1,000,000	998,401	99.84	100.00
			11,075,700	10,546,197	95.22	96.83

Sumber: e-Monitoring Kementerian PUPR tanggal 31 Desember 2024 pk.16.00 WIB

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat PPISDA mendapat *self blocking* sebesar Rp514.686.000,00 (lima ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) maka pagu Direktorat PPISDA tanpa blokir sebesar Rp10.561.014.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam puluh satu juta empat belas ribu rupiah) sehingga persentase realisasi adalah 99,86%.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 19 Sandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
2020	Rp11.042.309.000	Rp10.081.213.000	90,61%
2021	Rp11.048.405.000	Rp10.022.757.000	90,71%
2022	Rp 9.494.539.000	Rp 9.368.348.000	98,67%





2023	Rp11.300.643.000	Rp10.952.077.000	97,79%
2024	Rp11.075.700.000	Rp10.546.197.000	95,22%

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA melakukan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki seperti waktu, anggaran, dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan di tahun 2024. Berikut merupakan upaya pelaksanaan efektifitas dan efisiensi yang diterapkan Direktorat PPISDA dengan tetap memperhatikan pencapaian yang optimal atas pelaksanaan anggaran, kinerja dan sumber daya manusia, antara lain:

1. Mendorong melakukan beberapa kegiatan koordinasi dan rapat secara *daring* melalui media Zoom Meeting/Microsoft Teams, atau melakukan rapat *offline* di dalam kantor;
2. Pengoptimalan penggunaan anggaran sesuai rencana dan juga pengalokasian anggaran kepada kegiatan yang lebih membutuhkan;
3. Menjaga konsistensi penjadwalan kegiatan yang telah disusun dengan memperhatikan kualitas output kinerja optimal yang disesuaikan dengan dinamisasi progres proyek KPBU bidang Sumber Daya Air;
4. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan

3.5.1 Efisiensi Metode Kegiatan

Pada tahun 2024, metode pelaksanaan kegiatan di Direktorat PPISDA dilaksanakan secara daring dan luring. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berdampak langsung terhadap efektifitas dan efisien kegiatan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan secara daring (online) memungkinkan peserta untuk ikut serta tanpa harus hadir secara fisik di lokasi kegiatan. Keuntungan utama dari metode daring adalah kemudahan akses, di mana peserta dapat mengikuti kegiatan dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak, serta memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu. Selain itu, kegiatan daring juga mengurangi biaya operasional, seperti biaya transportasi, akomodasi, atau sewa tempat. Sejak dari masa pandemi, kegiatan daring menjadi solusi yang sangat efektif untuk menjaga jarak sosial dan tetap





menjalankan berbagai kegiatan penting. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan daring adalah keterbatasan interaksi langsung antar peserta, sehingga dapat mengurangi rasa kebersamaan dan hubungan interpersonal. Juga, tidak semua peserta mungkin memiliki akses atau keterampilan teknologi yang memadai untuk mengikuti kegiatan daring.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan luring (offline) memberikan pengalaman yang lebih langsung dan mendalam. Dalam pelaksanaan luring, peserta dapat berinteraksi secara langsung, baik dengan penyelenggara maupun sesama peserta, yang dapat meningkatkan ikatan sosial dan kolaborasi. Suasana fisik juga sering kali memberikan kesan yang lebih intens dan mendalam, serta memungkinkan kegiatan yang memerlukan penggunaan alat atau fasilitas tertentu yang tidak bisa diakses secara daring. Kegiatan luring juga memungkinkan peserta untuk lebih fokus dan mengurangi potensi gangguan yang biasa terjadi saat mengikuti kegiatan daring, seperti masalah koneksi internet atau multitasking. Namun, pelaksanaan luring juga memiliki keterbatasan, seperti membutuhkan biaya yang lebih besar untuk sewa tempat, transportasi, dan akomodasi. Selain itu, terbatasnya ruang dan waktu membuat jumlah peserta yang dapat hadir secara langsung juga menjadi faktor pembatas.

Pemilihan antara pelaksanaan kegiatan daring dan luring harus disesuaikan dengan tujuan, audiens, dan konteks kegiatan itu sendiri. Untuk kegiatan yang membutuhkan fleksibilitas waktu dan lokasi, serta mengutamakan efisiensi biaya, pelaksanaan daring bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebaliknya, jika interaksi langsung dan pengalaman yang lebih mendalam menjadi prioritas, pelaksanaan luring bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, kombinasi antara daring dan luring (hybrid) juga bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan manfaat dari kedua metode tersebut.

3.5.2 Efisiensi Anggaran

Pada tahun ini yaitu pada Tahun Anggaran 2024, Direktorat PPISDA juga melakukan efisiensi anggaran terhadap kegiatan yang belum optimum dan dialihkan kepada kegiatan yang lebih membutuhkan. Mekanisme yang digunakan untuk perubahan tersebut yakni berupa revisi POK ataupun revisi DIPA yang melibatkan Kantor Wilayah dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Perubahan anggaran berdasarkan pagu definitif dan pagu per bulan Desember tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.





Tabel 3 20 Perubahan Anggaran Berdasarkan Pagu Definitif dan Pagu Anggaran per

KODE	KEGIATAN/AKUN	PAGU DEFINITIF	DESEMBER 2024
DIREKTORAT PPISDA		12.000.000.000	11.075.700.000
4197.ABF.001.051.A	Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 dan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025	600.000.000	600.000.000
4197.ABF.001.052.A	Penyusunan Identifikasi dan Profil Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	500.000.000	500.000.000
4197.ABF.002.051.A	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sektor SDA TA. 2024	1.590.000.000	1.490.000.000
4197.ABF.003.051.A	Penyusunan Final Business Case Proyek KPBU Daerah Irigasi Lhok Guci, Aceh	2.500.000.000	2.075.700.000
4197.ABF.003.051.B	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Studi Kelayakan Proyek KPBU Unsolicited Infrastruktur Sumber Daya Air TA 2024	750.000.000	626.280.000
4197.ABF.004.051.A	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2024	600.000.000	600.000.000
4197.AEE.001.051.A	Penyiapan Tahapan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2024	1.100.000.000	1.100.000.000
4197.AEE.001.052.A	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2024	800.000.000	593.720.000
4197.AEE.001.052.B	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Lainnya TA. 2024	1.600.000.000	1.230.000.000





KODE	KEGIATAN/AKUN	PAGU DEFINITIF	DESEMBER 2024
4197.AFA.001.051.A	NSPK Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Bendungan untuk mendukung energi terbarukan	-	300.000.000
4197.EBD.953.051.A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan dan Penyiapan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2024	240.000.000	240.000.000
4197.EBD.953.051.B	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2024	240.000.000	240.000.000
4197.EBD.953.051.C	Penyusunan Perkembangan Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Tahun 2024 Melalui Media Informasi	240.000.000	240.000.000
4197.EBD.953.051.D	Penyusunan Profil Risiko Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2024	240.000.000	240.000.000
4194.EBA.994.002.M	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPISDA	1.000.000.000	1.000.000.000

3.6 Penghargaan Atas Kinerja

Pada tahun 2024, Direktorat PPISDA telah resmi memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dari lembaga yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyuapan di sektor sumber daya air.

Sertifikasi ini tidak hanya menjadi pengakuan atas implementasi sistem pencegahan penyuapan yang efektif, tetapi juga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap integritas dan profesionalisme Direktorat PPISDA dalam menjalankan tugasnya. Dengan standar ini, Direktorat PPISDA semakin menegaskan





komitmennya untuk memastikan bahwa setiap proses pembiayaan dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, meminimalkan risiko korupsi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan berintegritas.

Keberhasilan ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong penerapan standar antikorupsi di sektor publik maupun swasta. Dengan demikian, Direktorat PPISDA tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai model dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang dapat menjadi referensi bagi institusi lain dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

3.7 Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan akuntabilitas dari sebuah organisasi ataupun unit kerja. Hasil serta analisis yang disampaikan dalam laporan kinerja memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani di awal tahun. Hal ini menunjukkan komitmen Direktorat PPISDA terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu, mencerminkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.
2. Laporan kinerja sebagai alat monitoring dan evaluasi yang memberikan informasi mengenai capaian kinerja Direktorat PPISDA setiap bulannya. Hal ini memungkinkan Direktorat PPISDA untuk memantau progress pencapaian target berkala, mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang muncul, menganalisis penyebab kendala dan permasalahan, serta mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya mencatat pencapaian, tetapi juga menjadi dasar untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.
3. Hasil analisis dalam laporan kinerja menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih realistis dan efektif, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, pengembangan kebijakan dan program yang relevan dengan kebutuhan unit kerja, serta pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Hal ini mengingat, informasi kinerja yang akurat dan komprehensif memungkinkan Direktorat PPISDA untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang.





Dengan demikian, pemanfaatan informasi laporan kinerja secara optimal memungkinkan Direktorat PPISDA untuk dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan memberikan kontribusi yang lebih baik.

3.7.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian Direktur PPISDA selaku Pimpinan Utama. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan Pimpinan pada rapat monitoring dan evaluasi progres proyek KPBU Sumber Daya Air yang diselenggarakan setiap triwulan serta capaian kinerja Direktorat PPISDA setiap bulan. Rapat tersebut membahas mengenai isu-isu strategis proyek KPBU sektor SDA, capaian kinerja, rencana kinerja, realisasi anggaran, serta permasalahan dan rekomendasi. Dalam rapat tersebut hal-hal yang menjadi perhatian Pimpinan antara lain, apakah target-target yang telah ditetapkan tercapai, deviasi antara target dan realisasi menjadi perhatian Pimpinan untuk memahami penyebab penyimpangan serta merumuskan strategi pemecahan masalah dan/atau menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Direktorat PPISDA.

Gambar 3 6 Tangkapan Layar Keikutsertaan Pimpinan dalam Rapat Penyusunan Lakin 2024





3.7.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja Direktorat PPISDA TA 2024 tidak akan efektif tanpa dukungan aktif seluruh pegawai. Data dan informasi yang tercantum dalam laporan ini diperoleh melalui kontribusi pegawai dalam pengumpulan dan penyusunan data yang akurat, tepat waktu, dan relevan, dengan memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan kinerja ini mencerminkan keterlibatan dan komitmen pegawai terhadap keberhasilan organisasi, baik dalam pengumpulan data maupun pencapaian target yang tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Kepedulian pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja juga terlihat dalam pembahasan isu strategis, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan, rekomendasi, kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, serta deviasi antara rencana dan realisasi fisik dan keuangan yang telah dibahas dalam acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan KPBU TA 2020-2024 dan Strategi Pelaksanaan KPBU serta Pembiayaan Inovatif Sektor Sumber Daya Air TA 2025-2029, yang melibatkan seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana di lingkungan PPISDA, serta mitra kerja terkait. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam acara tersebut telah menjadi perhatian dan kepedulian bersama seluruh pegawai, menunjukkan bahwa setiap pegawai memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dan kesuksesan organisasi.





Gambar 3 7Rapat Evaluasi Pelaksanaan KPBU TA 2020-2024 dan Strategi Pelaksanaan KPBU serta Pembiayaan Inovatif Sektor Sumber Daya Air TA 2025-2029



3.7.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan secara efektif dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah Rapat Pembahasan Revisi Perjanjian Kinerja terkait Revisi DIPA ke-6 dan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Bulan Agustus TA 2024, yang dilaksanakan pada 2 September 2024. Rapat ini bertujuan untuk menyesuaikan perubahan output pada Rincian Output (RO) AEE.001 Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan, yang sebelumnya memiliki empat kesepakatan, menjadi dua kesepakatan berdasarkan Revisi DIPA ke-6 pada tanggal 9 Agustus 2024. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan keselarasan dengan perubahan kebutuhan, prioritas, dan perkembangan kondisi terkini. Selain itu, rapat ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua target dan indikator kinerja pada bulan Agustus TA 2024 telah tercapai sesuai dengan rencana. Dalam rapat tersebut, juga diidentifikasi permasalahan atau hambatan yang





ada, serta langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di bulan berikutnya. Dengan demikian, informasi dalam laporan kinerja berkala tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi hasil, tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan guna memastikan pencapaian kinerja yang optimal.

Informasi mengenai kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, permasalahan, dan rekomendasi memang merupakan dasar yang penting untuk penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan. Direktorat PPISDA menggunakan informasi ini untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat mencapai target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja untuk memperbaiki atau mengoptimalkan langkah-langkah yang diambil agar sesuai dengan tujuan organisasi.

Selain itu, penyusunan Laporan Kegiatan Mingguan dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan yang disampaikan kepada pimpinan menjadi alat untuk memantau capaian kinerja. Laporan ini juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan, memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tetap selaras dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses penyesuaian ini menunjukkan pentingnya informasi dalam laporan kinerja sebagai alat untuk perbaikan berkelanjutan dan pencapaian kinerja yang optimal.

3.7.4 Analisis Terhadap Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Berkala

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan secara efektif dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja yang optimal. Salah satunya adalah melalui pembahasan capaian kinerja Direktorat PPISDA yang dilaksanakan setiap bulan yang juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Dalam rapat ini, dilakukan pembahasan mengenai sejauh mana anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan antara realisasi anggaran dan target kinerja yang diinginkan, pembahasan ini memberikan dasar untuk melakukan penyesuaian anggaran agar lebih selaras dengan prioritas dan kebutuhan yang ada.

Melalui pendekatan ini, anggaran tidak hanya dipantau dari segi pengeluarannya, tetapi juga dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pencapaian kinerja. Hal ini memungkinkan Direktorat PPISDA untuk mengidentifikasi kegiatan yang membutuhkan alokasi lebih besar atau lebih kecil, serta untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan anggaran digunakan secara efisien dan





memberikan hasil yang maksimal. Dengan demikian, informasi dalam laporan kinerja berkala menjadi dasar yang penting dalam pengambilan keputusan terkait penyesuaian anggaran di Direktorat PPISDA, guna memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

3.7.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja tahun 2023 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Hal ini dapat dilihat melalui adanya Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat PPISDA Tahun Anggaran 2022, yang melampirkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2022. Laporan tersebut telah disusun dan ditandatangani oleh para Evaluator dan Evaluatan AKIP sebagai bukti kesepakatan mengenai hasil evaluasi, yang menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja telah memenuhi target dan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan atau area yang perlu diperbaiki, serta menjadi acuan dalam perencanaan dan penyesuaian strategi untuk tahun berikutnya.

3.7.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Informasi dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024, yang kemudian menjadi dasar untuk perbaikan kinerja, baik dalam hal pencapaian target maupun efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa rencana yang disusun lebih relevan dan efektif. Muatan laporan yang digunakan dalam proses penyesuaian ini antara lain berupa isu strategis, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan dan rekomendasi, kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, serta deviasi antara rencana dan realisasi fisik dan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan dan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun yang akan datang.





BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan kinerja ini merupakan bentuk konkrit akuntabilitas kinerja yang kompleks dalam mempertanggungjawabkan anggaran serta target yang telah diamanatkan dalam Renstra, DIPA maupun Perjanjian Kinerja kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerjanya, semua tertuang dalam laporan kinerja.

Awal tahun 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki pagu sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang kemudian mengalami revisi anggaran karena adanya refocusing/optimalisasi serta *self blocking* anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran Direktorat PPISDA saat menjelang akhir tahun sebesar Rp 11.075.700.000,00 (sebelas milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Capaian kinerja Direktorat PPISDA terhadap Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah 23,77% dari target 25% sesuai dengan target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Sedangkan capaian atas anggaran Direktorat PPISDA pada Tahun 2024 ini berdasarkan data emonitoring online status tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 10.546.197.000,00 yaitu 95,22% realisasi anggaran, dan 96,83 % realisasi fisiknya.

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan Direktorat PPISDA dalam mencapai target capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor pendukung, diantaranya keterlibatan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan capaian kinerja, pembagian tugas dan fungsi yang seimbang bagi seluruh pegawai, melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, serta dukungan dan kerjasama dari Instansi/Unit Organisasi/Unit Kerja lain dalam melakukan percepatan penyiapan proyek KPBU sektor sumber daya air.





Keberhasilan lainnya adalah Direktorat PPISDA telah tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal ini dapat tercapai karena didukung kinerja yang baik oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Tim FKAP) serta seluruh pegawai Direktorat PPISDA yang komitmen untuk melaksanakan kegiatan SMAP.

4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, berbagai kendala muncul dan mempengaruhi jalannya proyek. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Proyek KPBU bergantung pada pembiayaan dari pihak swasta, yang mungkin kesulitan memperoleh dana yang cukup untuk proyek besar. Proyek sumber daya air membutuhkan investasi besar namun belum ada jaminan kinerja atau pengembalian investasi yang jelas.
2. Pengembalian investasi pada proyek KPBU sektor SDA yang dimungkinkan adalah dalam bentuk pembayaran atas ketersediaan layanan (Availability Payment/AP). Implikasinya, hal ini terkendala oleh keterbatasan kapasitas fiskal yang dimiliki Kementerian PUPR.
3. Sulitnya mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan sehingga menyebabkan mundurnya timeline dari target yang telah ditentukan bersama.
4. Perlunya penguatan kelembagaan KPBU melalui peraturan-peraturan yang efektif, dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU sehingga dapat meningkatkan minat pasar pada proyek KPBU khususnya sektor Sumber Daya Air.
5. Pada proyek KPBU yang memanfaatkan Bendungan Multiguna milik Kementerian PUPR khususnya sektor ketenagalistrikan, proses pengadaan BUP ada 2 tahap yaitu di pengadaan BUP di Kementerian PUPR dan pengadaan BUP di PT PLN (Persero).
6. Terdapat perubahan pagu anggaran yang dilakukan beberapa kali menyebabkan proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Agar dapat mencapai target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya, berikut rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan KPBU sektor Sumber daya Air antara lain:





1. Perlunya menyusun Renstra dan RPJMN PPISDA 2025 – 2029
2. Perlunya penguatan kelembagaan KPBU melalui penyesuaian dan pengembangan peraturan yang efektif, sehingga dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU dan dapat meningkatkan minat pasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
3. Perlunya upaya kolaboratif antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan dalam rangka rencana penetapan besaran AP pada proyek KPBU sektor Sumber Daya Air, melalui beberapa strategi diantaranya: (1) fasilitas pelaksanaan bimtek terkait skema KPBU-AP pada pihak-pihak terkait; (2) melakukan estimasi kelayakan proyek dengan beberapa skema alternatif secara bersama-sama antara Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, BPK serta para ahli untuk menentukan formula perhitungan pembayaran AP; dan (3) melakukan pemetaan proyek prioritas untuk memperoleh gambaran mengenai alokasi sumber pendanaan, untuk mencapai kapasitas fiskal yang optimal.
4. Perlunya payung hukum untuk mengakomodir pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada proyek KPBU SDA subsektor Bendungan.
5. Perlunya penguatan kelembagaan KPBU melalui penyesuaian dan pengembangan peraturan yang efektif, sehingga dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU dan dapat meningkatkan minat pasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
6. Melakukan kolaborasi riset dengan akademisi terkait skema pembiayaan KPBU SDA yang kreatif dan inovatif;
7. Menjalin koordinasi yang intensif dan sinergis antar Kementerian/Lembaga, Badan Usaha dan pemangku kepentingan; dan
8. Optimalisasi pengelolaan anggaran yang lebih efisien untuk memaksimalkan dampak dari setiap alokasi dana yang tersedia.





LAMPIRAN





Lampiran 1

Perjanjian Kinerja





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arvi Argyantoro**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

ARVI ARGYANTORO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>		25%	
ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan
AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	4	Kesepakatan
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

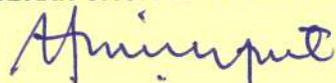
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp12.000.000.000,00

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**



ARVI ARGYANTORO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Tahun 2024

Nama RO		Target	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Rekomendasi Kebijakan	1. Bendungan Lambakan 2. Bendungan Saddang	-
ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	1. DI Jambo Aye	-
ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Rekomendasi Kebijakan	1. DI Lhok Guci 2. Penyediaan Infrastruktur PLTM Way Sekampung 3. PLTM Karalloe	Rp4,16 T Rp115,9 M Rp170 M Rp123 M
ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	1. Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komerling Berdasarkan Prinsip Syariah 2. Proyek KPBU Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion Wilayah Sungai Lombok Berdasarkan Prinsip Syariah 3. Bendungan Merangin	Rp1,65T Rp1,57 T Rp7,85 T
AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	4 Kesepakatan	1. Bendungan Merangin 2. DI Lhok Guci 3. PLTM Karalloe 4. Penyediaan Infrastruktur PLTM Way Sekampung	Rp7,85 T Rp4,16 T Rp123 M Rp115,9 M

JAKARTA, 15 JANUARI 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
 INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**


ARVI ARGYANTORO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arvi Argyantoro**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua

TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama

ARVI ARGYANTORO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>		25%	
ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan
AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	4	Kesepakatan
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp11.700.000.000,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**


TRIONO JUNOASMONO

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**


ARVI ARGYANTORO

Lampiran I Nota Dinas Direktorat
Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Daya Air
Nomor : 118/KP/Pn/2024
Tanggal : 9 Agustus 2024

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Daftar Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	1. Bendungan Lambakan	Rp 7.220.000.000.000,00
	2. Bendungan Saddang	Rp 3.010.000.000.000,00
Penyiapan	1. DI Jambo Aye	Rp 263.000.000.000,00
	2. DI Lhok Guci	Rp4.160.000.000.000,00
	3. Bendungan Cidanau	Rp 1.720.000.000.000,00
	4. Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp1.650.000.000.000,00
	5. Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion Wilayah Sungai Lombok Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp1.580.000.000.000,00
	6. Bendungan Merangin	Rp7.850.000.000.000,00
Transaksi	1. Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp1.650.000.000.000,00
	2. Bendungan Bodri	Rp 2.073.000.000.000,00
	3. Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,41 MW pada Bendungan Leuwikeris	Rp225.380.000.000,00
	4. Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji	Rp920.400.000.000,00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Harya Muldianto**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2024 -

Pihak Kedua

TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama

HARYA MULDIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>		25%	
ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan
AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp11.500.000.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

TRINO JUNOASMONO

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**

HARYA MULDIANTO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	Bendungan Lambakan	Rp7,220,000,000,000.00
	Bendungan Saddang	Rp3,010,000,000,000.00
Penyiapan	DI Jambo Aye	Rp1,840,000,000,000.00
	DI Lhok Guci	Rp4,160,000,000,000.00
	Bendungan Cidanau	Rp1,720,000,000,000.00
	Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp1,650,000,000,000.00
	Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi <i>High Level Diversion</i> Wilayah Sungai Lombok Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp1,580,000,000,000.00
	Bendungan Merangin, Jambi	Rp7,850,000,000,000.00
	Bendungan Bodri	Rp2,073,000,000,000.00
	Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,4 MW pada Bendungan Leuwikeris	Rp225,830,000,000.00
Transaksi	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji	Rp920,400,000,000.00
	Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp1,650,000,000,000.00

JAKARTA, OKTOBER 2024

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR



HARY MULDIANTO



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264267, (021) 7264267

NOTA DINAS

Nomor: 05 / ND / Pa / 2025

Yth : Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
Dari : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja Revisi dan Nilai Investasi Proyek KPBU Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 17 Januari 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan No.06/ND/Pk/2025, tanggal 15 Januari 2025 hal Penyampaian Konsep Perjanjian Kinerja Revisi Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Konsep Perjanjian Kinerja Revisi dan Lampiran Proyek KPBU Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam DIPA tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air

Harya Muldianto

NIP. 1196909041999031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Harya Muldianto**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua

TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama

HARYA MULDIANTO

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>		25%	
ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan
AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp11.075.700.000,00

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

TRIONO JUNOASMONO

JAKARTA, DESEMBER 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**

HARYA MULDIANTO

Lampiran I Nota Dinas Direktorat
Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Daya Air
Nomor : 65/MD/PA/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	Bendungan Lambakan	Rp 7.220.000.000.000,00
	Bendungan Saddang	Rp3.010.000.000.000,00
Penyiapan	DI Jambo Aye	Rp 1.680.000.000.000,00
	Pembangunan Jaringan Irigasi di DI Lhok Guci, Provinsi Aceh	Rp3.320.000.000.000,00
	Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp1.650.000.000.000,00
	Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion Wilayah Sungai Lombok Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp1.580.000.000.000,00
	Bendungan Merangin	Rp7.850.000.000.000,00
	Bendungan Bodri	Rp 2.073.000.000.000,00
	Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,4 MW pada Bendungan Leuwikeris	Rp225.380.000.000,00
Transaksi	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji	Rp920.400.000.000,00
	Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp1.650.000.000.000,00



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:4802-3042-5381-4788

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 160.758.779.000 (SERATUS ENAM PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	160.758.779.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 160.758.779.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

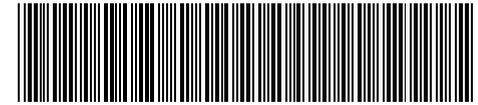


DS:4802-3042-5381-4788

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	131.526.779.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	131.526.779.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.232.000.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.232.000.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

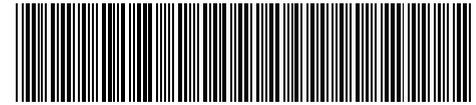


DS:4802-3042-5381-4788

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.232.000.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.232.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	131.526.779.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	71.920.590.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	10.500.000.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	49.106.189.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			29.232.000.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			29.232.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.720.000.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.720.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	100,00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Mikro Kredit Perumahan (PN)	100.00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			131.526.779.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			71.920.590.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	62.210.590.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	540.000.000
			02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	650.000.000
			03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.700.000.000
			04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	600.000.000
			05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	650.000.000
			06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	150.000.000
			07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	62.920.590.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	1.600.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2,00	Unit	500.000.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2,00	Unit	1.100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	650.000.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260,00	Orang	650.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.460.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.200.000.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	660.000.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	600.000.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			10.500.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	6.530.000.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	5.230.000.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.900.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.900.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.070.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3,00	Dokumen	1.350.000.000
Kegiatan		:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			49.106.189.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		:	3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		:	4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	20,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	28.326.789.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		:	02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.590.000.000
		:	03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.250.000.000
		:	04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		:	05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
		:	06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000
		:	07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	4.546.189.000
		:	08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.250.000.000
		:	09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	4.250.000.000
		:	10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	800.600.000
		:	11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

	12	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.300.000.000
	13	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.740.000.000

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	12,00	Kesepakatan	13.039.400.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.500.000.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	3.000.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.539.400.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	4.000.000.000

Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.700.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.500.000.000
		02	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	700.000.000
		03	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000

Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	21,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.040.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	21.00	Dokumen	5.040.000.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

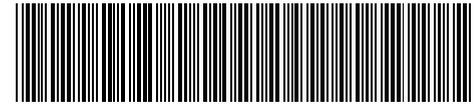
ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

I B. SUMBER DANA



DS:4802-3042-5381-4788

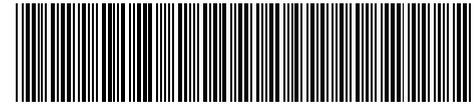
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

		Rp.	160.758.779.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2024					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni			160.758.779.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB			0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung			0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS			0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



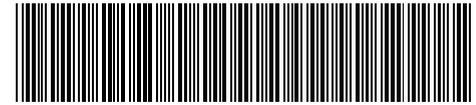
DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	34.260.590	124.988.189	1.510.000	-	-	160.758.779		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	29.232.000	-	-	-	29.232.000		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	29.232.000	-	-	-	29.232.000		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	01 . 54	
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	139	
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000	01 . 54	
01	RM	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



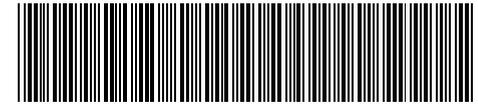
DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	01 . 54	
01 RM		-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	139@	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	34.260.590	95.756.189	1.510.000	-	-	131.526.779		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	34.260.590	36.150.000	1.510.000	-	-	71.920.590		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	34.260.590	32.950.000	-	-	-	67.210.590	01 . 54	
01 RM		34.260.590	32.950.000	-	-	-	67.210.590	139@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



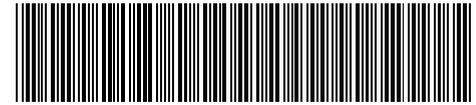
DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	90.000	1.510.000	-	-	1.600.000	01 . 54	
01	RM	-	90.000	1.510.000	-	-	1.600.000	139	
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	650.000	-	-	-	650.000	01 . 54	
01	RM	-	650.000	-	-	-	650.000	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.460.000	-	-	-	2.460.000	01 . 54	
01	RM	-	2.460.000	-	-	-	2.460.000	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	10.500.000	-	-	-	10.500.000		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.530.000	-	-	-	6.530.000	01 . 54	
01	RM	-	6.530.000	-	-	-	6.530.000	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



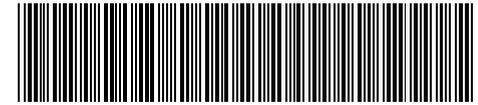
DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000	01 . 54	
01	RM	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000	139	
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	01 . 54	
01	RM	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	49.106.189	-	-	-	49.106.189		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	28.326.789	-	-	-	28.326.789	01 . 54	
01	RM	-	28.326.789	-	-	-	28.326.789	139	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	13.039.400	-	-	-	13.039.400	01 . 54	
01	RM	-	13.039.400	-	-	-	13.039.400	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

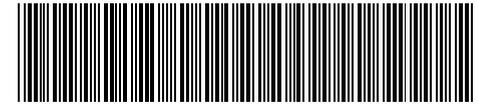
Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	01 . 54	
01 RM		-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	139	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.040.000	-	-	-	5.040.000	01 . 54	
01 RM		-	5.040.000	-	-	-	5.040.000	139	
JUMLAH		34.260.590	124.988.189	1.510.000	-	-	160.758.779		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.561.078	5.915.459	8.484.878	10.870.915	9.487.413	14.475.262	13.124.176	13.767.050	15.625.520	22.972.012	26.133.455	17.341.562	160.758.779
		BELANJA PEGAWAI	1.228.229	2.541.166	2.541.166	4.421.780	2.541.166	4.421.780	2.541.166	2.541.166	2.541.166	2.541.166	2.541.166	3.859.471	34.260.590
		BELANJA BARANG	1.332.849	3.374.293	5.617.022	6.449.134	6.946.247	10.053.481	10.583.009	11.045.904	13.084.354	20.070.846	22.948.959	13.482.090	124.988.189
		BELANJA MODAL	0	0	326.690	0	0	0	0	179.980	0	360.000	643.330	0	1.510.000
033.16.IA.4976		Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	65.230	437.306	1.081.189	1.047.159	1.169.280	2.338.560	2.338.560	2.630.880	1.811.738	6.080.898	7.308.000	2.923.200	29.232.000
033.16.WA.4194		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	65.230	437.306	1.081.189	1.047.159	1.169.280	2.338.560	2.338.560	2.630.880	1.811.738	6.080.898	7.308.000	2.923.200	29.232.000
		Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.351.417	4.623.506	5.317.529	7.455.816	5.156.920	6.871.345	5.280.864	5.847.275	5.254.468	7.194.472	9.635.681	6.931.296	71.920.590
033.16.WA.4195		51 BELANJA PEGAWAI	1.228.229	2.541.166	2.541.166	4.421.780	2.541.166	4.421.780	2.541.166	2.541.166	2.541.166	2.541.166	2.541.166	3.859.471	34.260.590
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.123.188	2.082.340	2.449.673	3.034.035	2.615.754	2.449.564	2.739.698	3.126.129	2.713.302	4.293.306	6.451.185	3.071.825	36.150.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	326.690	0	0	0	0	179.980	0	360.000	643.330	0	1.510.000
		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	121.000	296.200	315.000	525.000	840.000	1.260.000	1.470.000	1.462.000	1.356.600	1.190.200	929.000	735.000	10.500.000
033.16.WA.4197		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	121.000	296.200	315.000	525.000	840.000	1.260.000	1.470.000	1.462.000	1.356.600	1.190.200	929.000	735.000	10.500.000
		Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	23.431	558.446	1.771.160	1.842.940	2.321.213	4.005.357	4.034.751	3.826.896	7.202.714	8.506.442	8.260.774	6.752.065	49.106.189

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	23.431	558.446	1.771.160	1.842.940	2.321.213	4.005.357	4.034.751	3.826.896	7.202.714	8.506.442	8.260.774	6.752.065	49.106.189

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R**



DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 6.370.120		
	52 Belanja Barang Rp. 6.370.120		
033.16.IA 4976	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		
	526123 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000.000 Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasian dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
033.16.WA 4194	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.370.120 Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:4802-3042-5381-4788

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:3001-0600-3155-7949

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 03

Tanggal : 02 Mei 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 160.758.779.000 (SERATUS ENAM PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	160.758.779.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 160.758.779.000

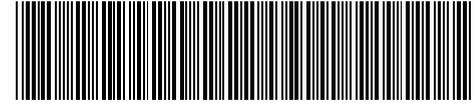
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

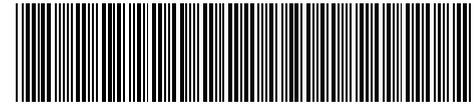


DS:3001-0600-3155-7949

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	131.526.779.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	131.526.779.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.232.000.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.232.000.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:3001-0600-3155-7949

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.232.000.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.232.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	131.526.779.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	71.970.590.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.700.000.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	47.856.189.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			29.232.000.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			29.232.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.720.000.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.720.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	100,00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Mikro Kredit Perumahan (PN)	100.00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			131.526.779.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			71.970.590.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	66.937.990.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	540.000.000
			02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	650.000.000
			03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.627.400.000
			04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	570.000.000
			05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
			06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.000.000
			07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	62.920.590.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2,00	Unit	500.000.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2,00	Unit	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	610.000.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260,00	Orang	610.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.422.600.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.182.600.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	660.000.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	580.000.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.751.000.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.501.000.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.879.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.879.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.070.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3,00	Dokumen	1.350.000.000
Kegiatan		:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			47.856.189.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		:	3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		:	4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	20,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	26.784.622.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		:	02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		:	03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		:	04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		:	05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	922.400.000
		:	06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000
		:	07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.791.789.000
		:	08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.168.153.000
		:	09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.800.000.000
		:	10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.146.000.000
		:	11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

	12	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.200.000.000
	13	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	12,00	Kesepakatan	12.416.809.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.423.720.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.562.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.431.089.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.679.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.479.000.000
		02	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	700.000.000
		03	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.975.758.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.975.758.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

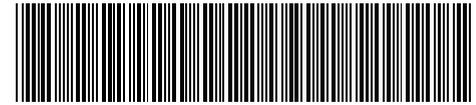
ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

I B. SUMBER DANA



DS:3001-0600-3155-7949

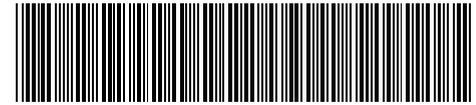
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	160.758.779.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	160.758.779.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



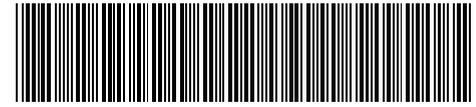
DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	34.260.590	124.588.189	1.910.000	-	-	160.758.779		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	29.232.000	-	-	-	29.232.000		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	29.232.000	-	-	-	29.232.000		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	01 . 54	
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	139	
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000	01 . 54	
01	RM	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	01 . 54	
01 RM		-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	139@	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	34.260.590	95.356.189	1.910.000	-	-	131.526.779		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	34.260.590	35.800.000	1.910.000	-	-	71.970.590		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	34.260.590	32.677.400	-	-	-	66.937.990	01 . 54	
01 RM		34.260.590	32.677.400	-	-	-	66.937.990	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	90.000	1.910.000	-	-	2.000.000	01 . 54	
01	RM	-	90.000	1.910.000	-	-	2.000.000	139	
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	610.000	-	-	-	610.000	01 . 54	
01	RM	-	610.000	-	-	-	610.000	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.422.600	-	-	-	2.422.600	01 . 54	
01	RM	-	2.422.600	-	-	-	2.422.600	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.700.000	-	-	-	11.700.000		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.751.000	-	-	-	7.751.000	01 . 54	
01	RM	-	7.751.000	-	-	-	7.751.000	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.879.000	-	-	-	1.879.000	01 . 54	
01	RM	-	1.879.000	-	-	-	1.879.000	139	
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	01 . 54	
01	RM	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	47.856.189	-	-	-	47.856.189		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	26.784.622	-	-	-	26.784.622	01 . 54	
01	RM	-	26.784.622	-	-	-	26.784.622	139	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	12.416.809	-	-	-	12.416.809	01 . 54	
01	RM	-	12.416.809	-	-	-	12.416.809	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.679.000	-	-	-	2.679.000	01 . 54	
01	RM	-	2.679.000	-	-	-	2.679.000	139	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.975.758	-	-	-	5.975.758	01 . 54	
01	RM	-	5.975.758	-	-	-	5.975.758	139	
JUMLAH		34.260.590	124.588.189	1.910.000	-	-	160.758.779		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.915.333	8.074.641	12.777.944	10.537.991	14.872.926	15.519.336	14.006.123	13.702.101	16.159.031	14.708.134	14.960.711	23.524.509	160.758.779
		BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.712.717	2.541.166	4.421.780	2.541.166	2.541.166	2.541.166	2.541.166	2.541.166	2.194.404	34.260.590
		BELANJA BARANG	449.393	5.272.856	7.011.975	7.312.293	11.954.881	10.826.415	11.464.957	11.160.935	13.617.865	12.166.968	12.419.545	20.930.105	124.588.189
		BELANJA MODAL	0	0	349.000	512.981	376.879	271.140	0	0	0	0	0	400.000	1.910.000
033.16.IA.4976		Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	54.562	669.636	764.006	2.077.204	3.530.380	1.638.460	1.841.300	2.424.233	1.595.115	2.288.999	2.844.038	9.504.068	29.232.000
033.16.WA.4194		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	54.562	669.636	764.006	2.077.204	3.530.380	1.638.460	1.841.300	2.424.233	1.595.115	2.288.999	2.844.038	9.504.068	29.232.000
		Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.845.879	6.433.057	8.934.695	5.100.802	5.862.767	7.799.473	5.615.131	5.512.790	5.570.324	5.855.297	6.168.963	7.271.411	71.970.590
033.16.WA.4195		51 BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.712.717	2.541.166	4.421.780	2.541.166	2.541.166	2.541.166	2.541.166	2.541.166	2.194.404	34.260.590
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	379.939	3.631.272	3.168.727	1.875.104	2.944.722	3.106.553	3.073.965	2.971.624	3.029.158	3.314.131	3.627.797	4.677.007	35.800.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	349.000	512.981	376.879	271.140	0	0	0	0	0	400.000	1.910.000
		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	2.563	136.568	663.182	747.234	1.081.219	1.236.420	1.383.199	1.331.880	1.290.425	1.214.546	1.072.569	1.540.198	11.700.000
033.16.WA.4197		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.563	136.568	663.182	747.234	1.081.219	1.236.420	1.383.199	1.331.880	1.290.425	1.214.546	1.072.569	1.540.198	11.700.000
		Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	12.329	835.380	2.416.061	2.612.751	4.398.560	4.844.983	5.166.493	4.433.198	7.703.167	5.349.293	4.875.142	5.208.832	47.856.189

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.329	835.380	2.416.061	2.612.751	4.398.560	4.844.983	5.166.493	4.433.198	7.703.167	5.349.293	4.875.142	5.208.832	47.856.189

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 4.000.000		
	52 Belanja Barang Rp. 4.000.000		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		
	526123 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang(RM) Rp. 4.000.000		
	Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:4011-4043-4168-2192

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 06

Tanggal : 09 Agustus 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 (SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

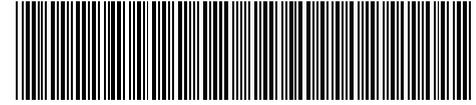
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

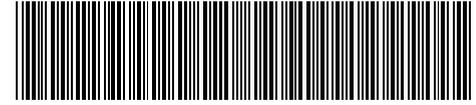


DS:4011-4043-4168-2192

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	142.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	142.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.090.354.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:4011-4043-4168-2192

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	142.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	84.264.536.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.700.000.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.976.912.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			29.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			29.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



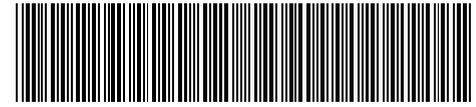
DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		100,00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Rincian Output		:	01	QFC.001	Mikro Kredit Perumahan (PN)	100.00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				142.941.448.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				84.264.536.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP				
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				79.405.993.000
Rincian Output		:	01	EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	686.734.000
			02	EBA.957	Layanan Hukum	1.00	Layanan	547.813.000
			03	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.334.800.000
			04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	641.320.000
			05	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
			06	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.000.000
			07	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	75.565.326.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2,00	Unit	591.680.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2,00	Unit	1.408.320.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	679.411.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260,00	Orang	679.411.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.179.132.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.033.207.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	618.425.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.751.000.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.501.000.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.879.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.879.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.070.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3,00	Dokumen	1.350.000.000
Kegiatan		:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			46.976.912.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		:	3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		:	4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.554.555.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		:	02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		:	03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		:	04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		:	05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.051.785.000
		:	06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		:	07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		:	08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.168.153.000
		:	09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		:	10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.146.000.000
		:	11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

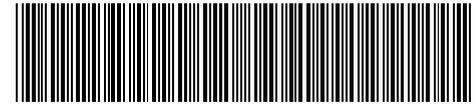
Halaman : I A. 5

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
	12	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.200.000.000
	13	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	12.067.809.000
Rincian Output	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	3.023.720.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.613.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.431.089.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.378.790.000
Rincian Output	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	400.000.000
	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.778.790.000
	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	700.000.000
	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.975.758.000
Rincian Output	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.975.758.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



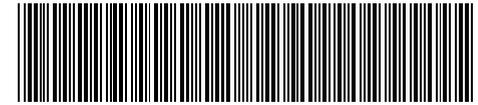
DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	46.905.326	123.126.476	2.000.000	-	-	172.031.802		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	29.090.354	-	-	-	29.090.354		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	29.090.354	-	-	-	29.090.354		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	01 . 54	
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	139	
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354	01 . 54	
01	RM	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



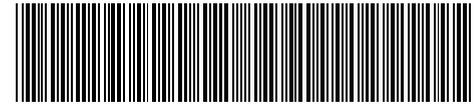
DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	01 . 54	
01 RM		-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	139@	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	46.905.326	94.036.122	2.000.000	-	-	142.941.448		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	46.905.326	35.359.210	2.000.000	-	-	84.264.536		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	46.905.326	32.500.667	-	-	-	79.405.993	01 . 54	
01 RM		46.905.326	32.500.667	-	-	-	79.405.993	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	01 . 54	
01	RM	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	139	
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	679.411	-	-	-	679.411	01 . 54	
01	RM	-	679.411	-	-	-	679.411	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.179.132	-	-	-	2.179.132	01 . 54	
01	RM	-	2.179.132	-	-	-	2.179.132	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.700.000	-	-	-	11.700.000		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.751.000	-	-	-	7.751.000	01 . 54	
01	RM	-	7.751.000	-	-	-	7.751.000	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



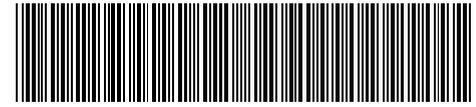
DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.879.000	-	-	-	1.879.000	01 . 54	
01	RM	-	1.879.000	-	-	-	1.879.000	139	
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	01 . 54	
01	RM	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	46.976.912	-	-	-	46.976.912		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	25.554.555	-	-	-	25.554.555	01 . 54	
01	RM	-	25.554.555	-	-	-	25.554.555	139	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	12.067.809	-	-	-	12.067.809	01 . 54	
01	RM	-	12.067.809	-	-	-	12.067.809	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.378.790	-	-	-	3.378.790	01 . 54	
01	RM	-	3.378.790	-	-	-	3.378.790	139	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.975.758	-	-	-	5.975.758	01 . 54	
01	RM	-	5.975.758	-	-	-	5.975.758	139	
JUMLAH		46.905.326	123.126.476	2.000.000	-	-	172.031.802		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.912.983	8.057.386	12.800.183	7.988.432	12.433.308	16.437.421	13.497.779	16.764.847	16.204.408	17.523.648	17.666.646	30.744.762	172.031.802
		BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.993.861	3.993.584	6.994.513	3.552.868	3.552.868	3.552.868	3.552.868	3.552.868	5.474.335	46.905.326
		BELANJA BARANG	447.043	5.255.601	7.034.215	4.506.589	8.144.111	9.041.005	9.806.088	13.011.979	12.524.860	13.970.779	14.113.778	25.270.427	123.126.476
		BELANJA MODAL	0	0	349.000	487.981	295.614	401.903	138.822	200.000	126.680	0	0	0	2.000.000
033.16.IA.4976		Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	54.562	669.636	764.006	740.774	866.765	1.365.025	2.383.439	3.329.491	2.746.718	3.989.270	3.552.865	8.627.804	29.090.354
033.16.WA.4194		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	54.562	669.636	764.006	740.774	866.765	1.365.025	2.383.439	3.329.491	2.746.718	3.989.270	3.552.865	8.627.804	29.090.354
		Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.843.529	6.498.579	8.923.143	5.363.794	6.665.417	10.157.042	6.291.138	6.367.938	6.179.391	6.123.594	6.483.147	13.367.825	84.264.536
033.16.WA.4195		51 BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.993.861	3.993.584	6.994.513	3.552.868	3.552.868	3.552.868	3.552.868	3.552.868	5.474.335	46.905.326
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	377.589	3.696.793	3.157.175	1.881.951	2.376.219	2.760.627	2.599.447	2.615.070	2.499.843	2.570.726	2.930.279	7.893.490	35.359.210
		53 BELANJA MODAL	0	0	349.000	487.981	295.614	401.903	138.822	200.000	126.680	0	0	0	2.000.000
		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	2.563	119.489	707.305	579.330	1.030.028	724.135	1.225.894	1.621.293	1.361.899	1.691.677	1.158.124	1.478.264	11.700.000
033.16.WA.4197		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.563	119.489	707.305	579.330	1.030.028	724.135	1.225.894	1.621.293	1.361.899	1.691.677	1.158.124	1.478.264	11.700.000
		Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	12.328	769.683	2.405.729	1.304.534	3.871.099	4.191.219	3.597.308	5.446.124	5.916.401	5.719.106	6.472.510	7.270.869	46.976.912

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.328	769.683	2.405.729	1.304.534	3.871.099	4.191.219	3.597.308	5.446.124	5.916.401	5.719.106	6.472.510	7.270.869	46.976.912

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

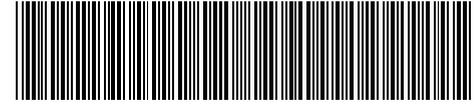
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	4.000.000
	52 Belanja Barang	Rp.	4.000.000
033.16.IA 4976	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		
	526123 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjustment	Rp.	4.000.000
	Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:1034-5930-5521-8455

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 08

Tanggal : 30 September 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 (SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:1034-5930-5521-8455

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	146.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	146.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.090.354.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:1034-5930-5521-8455

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	146.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	90.104.426.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.180.110.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	45.656.912.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			25.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			25.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
Rincian Output	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
Rincian Output	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			146.941.448.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			90.104.426.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	83.355.705.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	686.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	627.347.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.254.590.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	591.032.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.676.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	79.565.326.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5,00	Unit, m2, Paket	2.899.890.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	3.00	Unit	1.491.570.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.408.320.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	422,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.669.699.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	422,00	Orang	1.669.699.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.179.132.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.033.207.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	618.425.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.180.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.336.110.000
Rincian Output		:	01 ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.086.110.000
		:	02 ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.824.000.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.824.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.020.000.000
Rincian Output		:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	720.000.000
		:	02 EBD.965	Layanan Audit Internal	3,00	Dokumen	1.300.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			45.656.912.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.768.235.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.041.785.000
		06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.407.285.000
		09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.230.548.000
		11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
		12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000
		13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	10.801.168.000	
Rincian Output		:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.923.720.000
		:	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.553.000.000
		:	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.374.448.000
		:	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.950.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.188.212.000	
Rincian Output		:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	300.000.000
		:	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.758.790.000
		:	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	679.422.000
		:	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.899.297.000	
Rincian Output		:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.899.297.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

I B. SUMBER DANA



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	172.031.802.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	50.905.326	118.226.586	2.899.890	-	-	172.031.802		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	01 . 54	
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	139	
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354	01 . 54	
01	RM	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



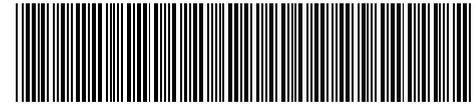
DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	50.905.326	93.136.232	2.899.890	-	-	146.941.448		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	50.905.326	36.299.210	2.899.890	-	-	90.104.426		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	50.905.326	32.450.379	-	-	-	83.355.705	01 . 54	
01 RM		50.905.326	32.450.379	-	-	-	83.355.705	139	
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.899.890	-	-	2.899.890	01 . 54	
01 RM		-	-	2.899.890	-	-	2.899.890	139@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	01 . 54	
01	RM	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.179.132	-	-	-	2.179.132	01 . 54	
01	RM	-	2.179.132	-	-	-	2.179.132	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.180.110	-	-	-	11.180.110		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	01 . 54	
01	RM	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	139	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	01 . 54	
01	RM	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	01 . 54	
01	RM	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	45.656.912	-	-	-	45.656.912		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	25.768.235	-	-	-	25.768.235	01 . 54	
01	RM	-	25.768.235	-	-	-	25.768.235	139	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	10.801.168	-	-	-	10.801.168	01 . 54	
01	RM	-	10.801.168	-	-	-	10.801.168	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	01 . 54	
01	RM	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

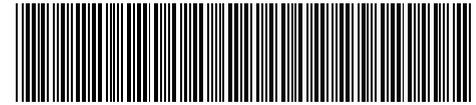
Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.899.297	-	-	-	5.899.297	01 . 54	
01 RM		-	5.899.297	-	-	-	5.899.297	139	
JUMLAH		50.905.326	118.226.586	2.899.890	-	-	172.031.802		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.912.982	8.057.353	12.800.139	7.988.432	12.433.300	16.437.441	13.404.160	17.706.802	16.265.473	18.302.875	17.220.881	29.501.964	172.031.802
		BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.993.861	3.993.584	6.994.513	3.552.868	3.552.868	3.552.868	3.552.868	3.552.868	9.474.335	50.905.326
		BELANJA BARANG	447.042	5.255.567	7.034.170	4.506.589	8.144.103	9.041.025	9.712.469	13.071.934	12.568.035	14.750.007	13.668.013	20.027.630	118.226.586
		BELANJA MODAL	0	0	349.000	487.981	295.614	401.903	138.822	1.082.000	144.570	0	0	0	2.899.890
033.16.IA.4976		Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	54.562	669.636	764.006	740.774	866.765	1.365.025	2.383.439	3.329.491	2.746.718	3.989.270	3.552.865	4.627.804	25.090.354
033.16.WA.4194		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	54.562	669.636	764.006	740.774	866.765	1.365.025	2.383.439	3.329.491	2.746.718	3.989.270	3.552.865	4.627.804	25.090.354
		Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.843.528	6.498.545	8.923.099	5.363.794	6.665.409	10.157.062	6.197.519	7.309.893	6.240.456	7.129.480	6.488.140	17.287.501	90.104.426
033.16.WA.4195		51 BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.993.861	3.993.584	6.994.513	3.552.868	3.552.868	3.552.868	3.552.868	3.552.868	9.474.335	50.905.326
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	377.588	3.696.760	3.157.130	1.881.951	2.376.211	2.760.647	2.505.829	2.675.025	2.543.017	3.576.612	2.935.272	7.813.167	36.299.210
		53 BELANJA MODAL	0	0	349.000	487.981	295.614	401.903	138.822	1.082.000	144.570	0	0	0	2.899.890
		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	2.563	119.489	707.305	579.330	1.030.028	724.135	1.225.894	1.621.293	1.361.899	1.691.677	1.072.734	1.043.763	11.180.110
033.16.WA.4197		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.563	119.489	707.305	579.330	1.030.028	724.135	1.225.894	1.621.293	1.361.899	1.691.677	1.072.734	1.043.763	11.180.110
		Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	12.328	769.683	2.405.729	1.304.534	3.871.099	4.191.219	3.597.308	5.446.124	5.916.401	5.492.449	6.107.141	6.542.896	45.656.912

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.328	769.683	2.405.729	1.304.534	3.871.099	4.191.219	3.597.308	5.446.124	5.916.401	5.492.449	6.107.141	6.542.896	45.656.912

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	899.890
	53 Belanja Modal	Rp.	899.890
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		
	Catatan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	899.890
	alokasi harus dilengkapi dokumen data dukung terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Rp.	899.890
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00	Rp.	899.890

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:4448-9648-5586-8499

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 09

Tanggal : 16 Oktober 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 (SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:4448-9648-5586-8499

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	146.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	146.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.090.354.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:4448-9648-5586-8499

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	146.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	90.844.706.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.180.110.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	44.916.632.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			25.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			25.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
Rincian Output	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
Rincian Output	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			146.941.448.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			90.844.706.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	83.741.705.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	726.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	685.347.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.359.590.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	591.032.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	783.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.676.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	79.565.326.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6,00	Unit, m2, Paket	3.166.799.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	4.00	Unit	1.794.848.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.371.951.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	422,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.669.699.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	422,00	Orang	1.669.699.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.266.503.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.120.578.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	618.425.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.180.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.336.110.000
Rincian Output		:	01 ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.086.110.000
		:	02 ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.824.000.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.824.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.020.000.000
Rincian Output		:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	720.000.000
		:	02 EBD.965	Layanan Audit Internal	3,00	Dokumen	1.300.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



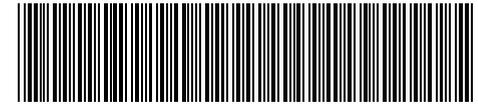
DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			44.916.632.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.343.935.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.701.980.000
		04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.041.785.000
		06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.407.285.000
		09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.230.548.000
		11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
		12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000
		13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	10.801.168.000	
Rincian Output		:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.923.720.000
		:	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.553.000.000
		:	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.374.448.000
		:	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.950.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.188.212.000	
Rincian Output		:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	300.000.000
		:	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.758.790.000
		:	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	679.422.000
		:	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.583.317.000	
Rincian Output		:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.583.317.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

I B. SUMBER DANA



DS:4448-9648-5586-8499

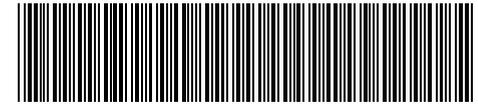
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	172.031.802.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



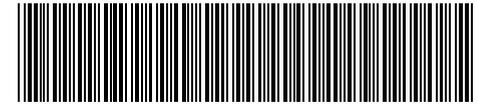
DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	50.905.326	117.959.677	3.166.799	-	-	172.031.802		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	01 . 54	
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	139	
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354	01 . 54	
01	RM	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	50.905.326	92.869.323	3.166.799	-	-	146.941.448		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	50.905.326	36.772.581	3.166.799	-	-	90.844.706		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	50.905.326	32.836.379	-	-	-	83.741.705	01 . 54	
01 RM		50.905.326	32.836.379	-	-	-	83.741.705	139	
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	3.166.799	-	-	3.166.799	01 . 54	
01 RM		-	-	3.166.799	-	-	3.166.799	139@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	01 . 54	
01	RM	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.266.503	-	-	-	2.266.503	01 . 54	
01	RM	-	2.266.503	-	-	-	2.266.503	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.180.110	-	-	-	11.180.110		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	01 . 54	
01	RM	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	139	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	01 . 54	
01	RM	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	01 . 54	
01	RM	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	44.916.632	-	-	-	44.916.632		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	25.343.935	-	-	-	25.343.935	01 . 54	
01	RM	-	25.343.935	-	-	-	25.343.935	139	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	10.801.168	-	-	-	10.801.168	01 . 54	
01	RM	-	10.801.168	-	-	-	10.801.168	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	01 . 54	
01	RM	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

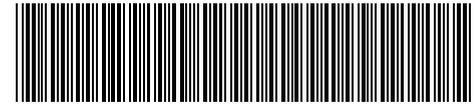
Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.583.317	-	-	-	5.583.317	01 . 54	
01 RM		-	5.583.317	-	-	-	5.583.317	139	
JUMLAH		50.905.326	117.959.677	3.166.799	-	-	172.031.802		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.912.983	8.057.386	12.800.183	7.988.301	12.433.298	16.283.492	11.206.610	15.665.392	16.692.600	18.937.668	22.822.170	27.231.718	172.031.802
		BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.993.861	3.993.584	6.994.513	3.497.699	3.546.517	3.524.579	3.546.517	3.546.517	9.576.845	50.905.326
		BELANJA BARANG	447.043	5.255.601	7.034.215	4.506.459	8.144.101	8.887.077	7.593.093	12.118.875	12.974.471	15.293.582	18.050.291	17.654.869	117.959.677
		BELANJA MODAL	0	0	349.000	487.981	295.614	401.903	115.817	0	193.550	97.569	1.225.362	3	3.166.799
033.16.IA.4976		Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	54.562	669.636	764.006	740.774	866.765	1.365.025	2.064.139	2.886.478	2.148.701	3.927.031	5.761.801	3.841.438	25.090.354
033.16.WA.4194		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	54.562	669.636	764.006	740.774	866.765	1.365.025	2.064.139	2.886.478	2.148.701	3.927.031	5.761.801	3.841.438	25.090.354
		Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.843.529	6.498.579	8.923.143	5.363.794	6.665.417	10.069.052	6.049.548	6.672.487	6.669.985	7.737.973	8.446.048	15.905.150	90.844.706
033.16.WA.4195		51 BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.993.861	3.993.584	6.994.513	3.497.699	3.546.517	3.524.579	3.546.517	3.546.517	9.576.845	50.905.326
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	377.589	3.696.793	3.157.175	1.881.951	2.376.219	2.672.637	2.436.031	3.125.970	2.951.857	4.093.887	3.674.169	6.328.301	36.772.581
		53 BELANJA MODAL	0	0	349.000	487.981	295.614	401.903	115.817	0	193.550	97.569	1.225.362	3	3.166.799
		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	2.563	119.489	707.305	579.330	1.030.028	724.135	624.881	996.058	1.142.507	1.924.771	1.484.500	1.844.543	11.180.110
033.16.WA.4197		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.563	119.489	707.305	579.330	1.030.028	724.135	624.881	996.058	1.142.507	1.924.771	1.484.500	1.844.543	11.180.110
		Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	12.328	769.683	2.405.729	1.304.404	3.871.089	4.125.281	2.468.042	5.110.368	6.731.407	5.347.893	7.129.820	5.640.587	44.916.632

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.328	769.683	2.405.729	1.304.404	3.871.089	4.125.281	2.468.042	5.110.368	6.731.407	5.347.893	7.129.820	5.640.587	44.916.632

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	899.890
	53 Belanja Modal	Rp.	899.890
033.16.WA 4194	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		
	Catatan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	899.890
	alokasi harus dilengkapi dokumen data dukung terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Rp.	899.890
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00	Rp.	899.890

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:9017-5346-1114-5031

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 11

Tanggal : 12 November 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 (SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

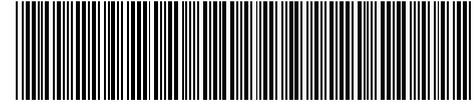
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

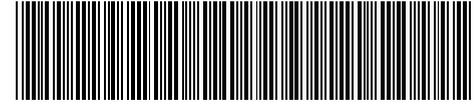


DS:9017-5346-1114-5031

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	146.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	146.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.090.354.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:9017-5346-1114-5031

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	146.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	90.844.706.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.180.110.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	44.916.632.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			25.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			25.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
Rincian Output	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
Rincian Output	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			146.941.448.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			90.844.706.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	83.741.705.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	726.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	685.347.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.359.590.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	591.032.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	783.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.676.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	79.565.326.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6,00	Unit, m2, Paket	3.166.799.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	4.00	Unit	1.794.848.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.371.951.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	422,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.669.699.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	422,00	Orang	1.669.699.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.266.503.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.120.578.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	618.425.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.180.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.336.110.000
Rincian Output		:	01 ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.086.110.000
		:	02 ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.824.000.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.824.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.020.000.000
Rincian Output		:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	720.000.000
		:	02 EBD.965	Layanan Audit Internal	3,00	Dokumen	1.300.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			44.916.632.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.343.935.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.701.980.000
		04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.041.785.000
		06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.377.675.000
		09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.260.158.000
		11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
		12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000
		13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	10.801.168.000	
Rincian Output		:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.923.720.000
		:	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.553.000.000
		:	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.374.448.000
		:	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.950.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.188.212.000	
Rincian Output		:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	300.000.000
		:	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.758.790.000
		:	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	679.422.000
		:	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.583.317.000	
Rincian Output		:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.583.317.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

I B. SUMBER DANA



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	172.031.802.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	50.905.326	117.959.677	3.166.799	-	-	172.031.802		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	01 . 54	
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	139	
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354	01 . 54	
01	RM	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	50.905.326	92.869.323	3.166.799	-	-	146.941.448		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	50.905.326	36.772.581	3.166.799	-	-	90.844.706		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	50.905.326	32.836.379	-	-	-	83.741.705	01 . 54	
01 RM		50.905.326	32.836.379	-	-	-	83.741.705	139	
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	3.166.799	-	-	3.166.799	01 . 54	
01 RM		-	-	3.166.799	-	-	3.166.799	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



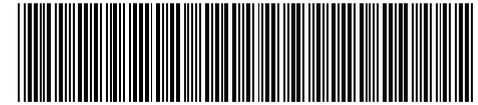
DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	01 . 54	
01	RM	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.266.503	-	-	-	2.266.503	01 . 54	
01	RM	-	2.266.503	-	-	-	2.266.503	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.180.110	-	-	-	11.180.110		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	01 . 54	
01	RM	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	139	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	01 . 54	
01	RM	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



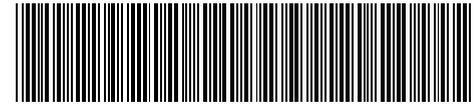
DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	01 . 54	
01	RM	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	44.916.632	-	-	-	44.916.632		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	25.343.935	-	-	-	25.343.935	01 . 54	
01	RM	-	25.343.935	-	-	-	25.343.935	139	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	10.801.168	-	-	-	10.801.168	01 . 54	
01	RM	-	10.801.168	-	-	-	10.801.168	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	01 . 54	
01	RM	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

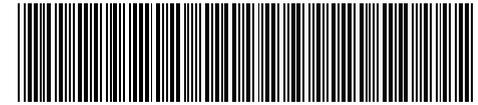
Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.583.317	-	-	-	5.583.317	01 . 54	
01 RM		-	5.583.317	-	-	-	5.583.317	139	
JUMLAH		50.905.326	117.959.677	3.166.799	-	-	172.031.802		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.912.983	8.057.386	12.800.183	7.988.301	12.433.298	16.283.492	11.206.610	15.665.392	16.692.600	18.913.951	22.822.170	27.255.435	172.031.802
		BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.993.861	3.993.584	6.994.513	3.497.699	3.546.517	3.524.579	3.546.517	3.546.517	9.576.845	50.905.326
		BELANJA BARANG	447.043	5.255.601	7.034.215	4.506.459	8.144.101	8.887.077	7.593.093	12.118.875	12.974.471	15.269.865	18.050.291	17.678.586	117.959.677
		BELANJA MODAL	0	0	349.000	487.981	295.614	401.903	115.817	0	193.550	97.569	1.225.362	3	3.166.799
033.16.IA.4976		Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	54.562	669.636	764.006	740.774	866.765	1.365.025	2.064.139	2.886.478	2.148.701	3.927.031	5.761.801	3.841.438	25.090.354
033.16.WA.4194		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	54.562	669.636	764.006	740.774	866.765	1.365.025	2.064.139	2.886.478	2.148.701	3.927.031	5.761.801	3.841.438	25.090.354
		Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.843.529	6.498.579	8.923.143	5.363.794	6.665.417	10.069.052	6.049.548	6.672.487	6.669.985	7.737.973	8.446.048	15.905.150	90.844.706
033.16.WA.4195		51 BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.993.861	3.993.584	6.994.513	3.497.699	3.546.517	3.524.579	3.546.517	3.546.517	9.576.845	50.905.326
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	377.589	3.696.793	3.157.175	1.881.951	2.376.219	2.672.637	2.436.031	3.125.970	2.951.857	4.093.887	3.674.169	6.328.302	36.772.581
		53 BELANJA MODAL	0	0	349.000	487.981	295.614	401.903	115.817	0	193.550	97.569	1.225.362	3	3.166.799
		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	2.563	119.489	707.305	579.330	1.030.028	724.135	624.881	996.058	1.142.507	1.924.771	1.484.500	1.844.543	11.180.110
033.16.WA.4197		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.563	119.489	707.305	579.330	1.030.028	724.135	624.881	996.058	1.142.507	1.924.771	1.484.500	1.844.543	11.180.110
		Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	12.328	769.683	2.405.729	1.304.404	3.871.089	4.125.281	2.468.042	5.110.368	6.731.407	5.324.176	7.129.820	5.664.303	44.916.632

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.328	769.683	2.405.729	1.304.404	3.871.089	4.125.281	2.468.042	5.110.368	6.731.407	5.324.176	7.129.820	5.664.303	44.916.632

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:9017-5346-1114-5031

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Rp.	899.890
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00	Rp.	899.890

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:9811-2159-6309-6731

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 13

Tanggal : 02 Desember 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 (SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:9811-2159-6309-6731

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	146.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	146.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.090.354.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

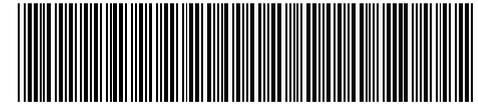


DS:9811-2159-6309-6731

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	146.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	90.844.706.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.180.110.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	44.916.632.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			25.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			25.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	6,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.789.642.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	6.00	Rekomendasi Kebijakan	5.789.642.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.300.712.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.300.712.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
Rincian Output	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
Rincian Output	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			146.941.448.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			90.844.706.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	83.741.705.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	726.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	685.347.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.359.590.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	591.032.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	783.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.676.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	79.565.326.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6,00	Unit, m2, Paket	3.166.799.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	4.00	Unit	1.794.848.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.371.951.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



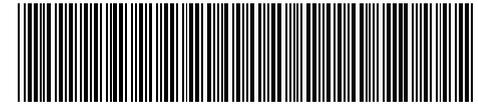
DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	422,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.669.699.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	422,00	Orang	1.669.699.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.266.503.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.120.578.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	618.425.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.180.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.336.110.000
Rincian Output		:	01 ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.086.110.000
		:	02 ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.824.000.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.824.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.020.000.000
Rincian Output		:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	720.000.000
		:	02 EBD.965	Layanan Audit Internal	3,00	Dokumen	1.300.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



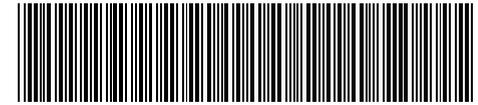
DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			44.916.632.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.663.935.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.206.600.000
		02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.710.000.000
		03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.695.380.000
		04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.041.785.000
		06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.377.675.000
		09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.260.158.000
		11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
		12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000
		13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

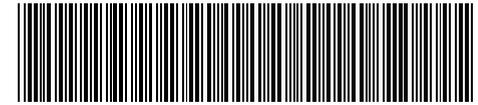
Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	10.481.168.000	
Rincian Output		:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.603.720.000
		:	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.553.000.000
		:	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.374.448.000
		:	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.950.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.188.212.000	
Rincian Output		:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	300.000.000
		:	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.758.790.000
		:	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	679.422.000
		:	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.583.317.000	
Rincian Output		:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.583.317.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	50.905.326	117.959.677	3.166.799	-	-	172.031.802		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.789.642	-	-	-	5.789.642	01 . 54	
01	RM	-	5.789.642	-	-	-	5.789.642	139@	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	139@	
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.300.712	-	-	-	6.300.712	01 . 54	
01	RM	-	6.300.712	-	-	-	6.300.712	139@	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139@	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139@	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	50.905.326	92.869.323	3.166.799	-	-	146.941.448		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	50.905.326	36.772.581	3.166.799	-	-	90.844.706		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	50.905.326	32.836.379	-	-	-	83.741.705	01 . 54	
01 RM		50.905.326	32.836.379	-	-	-	83.741.705	139@	
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	3.166.799	-	-	3.166.799	01 . 54	
01 RM		-	-	3.166.799	-	-	3.166.799	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	01 . 54	
01	RM	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	139@	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.266.503	-	-	-	2.266.503	01 . 54	
01	RM	-	2.266.503	-	-	-	2.266.503	139@	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.180.110	-	-	-	11.180.110		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	01 . 54	
01	RM	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	139@	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	01 . 54	
01	RM	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	139@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	01 . 54	
01	RM	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	139@	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	44.916.632	-	-	-	44.916.632		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	25.663.935	-	-	-	25.663.935	01 . 54	
01	RM	-	25.663.935	-	-	-	25.663.935	139@	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	10.481.168	-	-	-	10.481.168	01 . 54	
01	RM	-	10.481.168	-	-	-	10.481.168	139@	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	01 . 54	
01	RM	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	139@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.583.317	-	-	-	5.583.317	01 . 54	
01 RM		-	5.583.317	-	-	-	5.583.317	139@	
JUMLAH		50.905.326	117.959.677	3.166.799	-	-	172.031.802		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.912.983	8.057.386	12.800.183	7.988.301	12.433.298	16.283.492	11.206.610	15.665.392	16.692.600	18.813.951	22.722.170	27.455.435	172.031.802
		BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.993.861	3.993.584	6.994.513	3.497.699	3.546.517	3.524.579	3.546.517	3.546.517	9.576.845	50.905.326
		BELANJA BARANG	447.043	5.255.601	7.034.215	4.506.459	8.144.101	8.887.077	7.593.093	12.118.875	12.974.471	15.169.865	17.950.291	17.878.586	117.959.677
		BELANJA MODAL	0	0	349.000	487.981	295.614	401.903	115.817	0	193.550	97.569	1.225.362	3	3.166.799
033.16.IA.4976		Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	54.562	669.636	764.006	740.774	866.765	1.365.025	2.064.139	2.886.478	2.148.701	3.927.031	5.761.801	3.841.438	25.090.354
033.16.WA.4194		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	54.562	669.636	764.006	740.774	866.765	1.365.025	2.064.139	2.886.478	2.148.701	3.927.031	5.761.801	3.841.438	25.090.354
		Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.843.529	6.498.579	8.923.143	5.363.794	6.665.417	10.069.052	6.049.548	6.672.487	6.669.985	7.737.973	8.446.048	15.905.151	90.844.706
033.16.WA.4195		51 BELANJA PEGAWAI	1.465.940	2.801.785	5.416.968	2.993.861	3.993.584	6.994.513	3.497.699	3.546.517	3.524.579	3.546.517	3.546.517	9.576.845	50.905.326
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	377.589	3.696.793	3.157.175	1.881.951	2.376.219	2.672.637	2.436.031	3.125.970	2.951.857	4.093.887	3.674.169	6.328.302	36.772.581
		53 BELANJA MODAL	0	0	349.000	487.981	295.614	401.903	115.817	0	193.550	97.569	1.225.362	3	3.166.799
		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	2.563	119.489	707.305	579.330	1.030.028	724.135	624.881	996.058	1.142.507	1.924.771	1.484.500	1.844.543	11.180.110
033.16.WA.4197		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.563	119.489	707.305	579.330	1.030.028	724.135	624.881	996.058	1.142.507	1.924.771	1.484.500	1.844.543	11.180.110
		Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	12.328	769.683	2.405.729	1.304.404	3.871.089	4.125.281	2.468.042	5.110.368	6.731.407	5.224.176	7.029.820	5.864.303	44.916.632

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.328	769.683	2.405.729	1.304.404	3.871.089	4.125.281	2.468.042	5.110.368	6.731.407	5.224.176	7.029.820	5.864.303	44.916.632

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.800
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.736.299		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	52 Belanja Barang Rp. 2.736.299	4976.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		Layanan Manajemen Kinerja Internal
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.188		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.600
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.000	4976.PEA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Koordinasi
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.299
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.700		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 175.409
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.696		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)
	4976.AFA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.000	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 116.186
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Kebijakan S-1023/MK.02/2024

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
033.16.WA 4194 4194.EBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4194.EBC	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.520		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Layanan Manajemen SDM Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.866		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 179
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 280.127		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.085
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Program Dukungan Manajemen	4194.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36		
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.152	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan S-1023/MK.02/2024	4195 Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4195.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.631	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.902		
Kebijakan S-1023/MK.02/2024	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.448	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.592		
Kebijakan S-1023/MK.02/2024	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R**



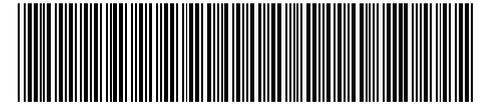
DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Rp. 27.300	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
4195.EBA	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 126.000 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.913 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.323 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.987 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 271.234 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4197.AEE	Kemitraan
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.572 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.262 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.650 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 135.432 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.776 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 209.038

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4197.AFA	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.274
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.917		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.595		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
4197.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 187.343		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.652			
Kebijakan S-1023/MK.02/2024			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 49.584			
Kebijakan S-1023/MK.02/2024			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:9811-2159-6309-6731

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Rp.	899.890
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00	Rp.	899.890

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



Lampiran 2

Bukti Dukung

Capaian Kinerja





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7200793

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 19 / BA / Dp / 2024

Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 bertempat di Hotel Kuretakeso Kemang Jakarta Selatan telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ /INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SS: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau			
IKSS: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	59,79	59,74	99,92
SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP: Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	200,06	200,06
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS 1. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100,00	163,47	163,47
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	100,00	99,33	99,33
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	99,37	99,96	100,59

2. Capaian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI TA. 2024

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	14,96	99,73
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15	100
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15,34	102,27
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15,43	102,85
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	14,50	96,65
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	15	15,24	101,58
7	Nilai SAKIP Unit Organisasi	10	10,13	101,30

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100	111,73	111,73

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25	23,77	95,08

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25	26,38	105,52

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25	25,42	101,68

f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25	24,73	98,92
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100	100,55	100,55

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2024

Yang Menyepakati,

Sekretaris Direktorat Jenderal



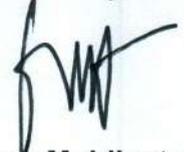
Reni Ahiantini

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



Agus Sulaeman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Harya Muldianto

Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan



Erna Wijayanti

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Meike Kencanawulan Martawidjaja

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Haryo Bektio Martoyoedo

Mengetahui,
Direktur Jenderal



Triho Junoasmono

Lampiran Berita Acara Kesepakatan Capaian
Kinerja DJPI TA. 2024

Nomor : 19/BA/DP/2024

Tanggal : 31 Desember 2024

A. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2024

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	24.220.000.000.000	220.000	24.577.192.153.214	200.300
2	Subsidi Selisih Bunga (SSB)*	4.609.438.646.000	751.735	4.609.438.646.000	732.927
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	895.000.000.000	220.000	852.348.000.000	208.869
4	SMF	-	11.540	12.400.526.222.312	271.653
5	TAPERA	1.431.900.000.000	7.251	934.222.383.307	5.780
TOTAL		31.156.338.646.000	238.791	43.373.727.404.833	477.733

Keterangan:

Target unit berdasarkan Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024

*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 751.735 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

**) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

B. Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
1	Perencanaan	9	44 Responden	97,27%	29,18%
2	Pelaksanaan	7		97,12%	
3	Outcomes	5		97,42%	

Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada 44 Responden didapatkan nilai sebesar 97,27%, sehingga **capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 adalah sebesar 29,18%**.

C. Capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
1	Input Kegiatan	10	44 Responden	98,75	29,33
2	Aktivitas Kegiatan	3		98,23	
3	Output Kegiatan	2		97,85	

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
4	Outcomes Kegiatan	9		97,42	
5	Impact Kegiatan	2		96,55	

Hasil Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada 44 Responden didapatkan nilai sebesar 97,76%, sehingga **capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024** adalah sebesar **29,33%**.

D. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan (35%)

NO	SEKTOR	TARGET	REALISASI		
		JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	TAHAPAN
1	Sumber Daya Air	9	10	Bendungan Lambakan	Perencanaan
				Bendungan Saddang	Perencanaan
				DI Jambo Aye, Aceh	Penyiapan
				DI Lhok Guci, Aceh	Penyiapan
				Bendungan Merangin	Penyiapan
				PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	Penyiapan
				Bendungan Bodri	Penyiapan
				Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok	Penyiapan
				Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering	Penyiapan
				Bendungan Cidanau	Penyiapan
2	Jalan dan Jembatan	8	3	Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang	Penyiapan
				Jalan Tol Pluit Bandara	Penyiapan
				Jalan Tol Malang - Kepanjen	Penyiapan
3	Perumahan	2	3	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	Penyiapan
				Rusun Cisaranten Bina Harapan	Penyiapan
				Rusun Kota Surabaya	Penyiapan

NO	SEKTOR	TARGET	REALISASI		
		JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	TAHAPAN
4	Permukiman	5	6	SPAM Bitung	Penyiapan
				Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Singdangheula	Penyiapan
				SPAM Regional Lombok	Penyiapan
				SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	Penyiapan
				SPAM - SPAL IKN	Penyiapan
				SPAM Regional Ayung I	Penyiapan
5	Lainnya	-	2	Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengelolaan SPAM	Penyiapan
				KSP Wisma Werdhapura	Penyiapan
TOTAL		24	24		
Capaian Proyek Tahap Perencanaan dan Penyiapan (35%)			35%		

Keterangan:

- Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS)

E. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Siap Dikerjasamakan Tahun 2024 (35%)

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI			
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI	TAHAPAN
1	Sumber Daya Air	2	2.570.400.000.000	1	PLTA Tiga Dihaji, Sumatera Selatan	920.399.742.833	<i>Bid Award</i>
2	Jalan dan Jembatan	2	28.210.000.000.000	4	Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi	25.404.000.000.000	PQ
					Flyover Sitinjau Lauik	2.793.000.000.000	<i>Bid Award</i>
					Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi	21.012.000.000.000	PPJT
					Jalan Tol Palembang – Betung	14.981.000.000.000	PPJT
3	Perumahan	2	996.424.481.923	1	Rusun Karawang Spuur	272.474.481.923	Pengajuan Lelang
4	Permukiman	2	4.802.000.000.000	2	B to B SPAM Kertasari	1.047.000.000.000	<i>Financial Close</i>
					SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 lpd	3.755.000.000.000	Pembentukan BUP
TOTAL		8	36.578.824.481.923	8	70.184.874.481.923		
Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (35%)				35%			
Capaian Nilai Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)				134,31%			

Keterangan:

- Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Proyek Siap Dikerjasamakan minimal masuk Tahap Prakualifikasi
- Nilai Investasi yang dihitung sebagai capaian IKSS merupakan nilai investasi proyek siap untuk lelang (minimal Tahap Prakualifikasi)

F. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEUANGAN (%)		FISIK (%)		
					RN	RL	RN	RL	KINERJA
I	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.090.354	24.032.934	100,00	95,79	100,00	100,00	100,00
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	25.090.354	24.032.934	100,00	95,79	100,00	100,00	100,00
II	WA	Program Dukungan Manajemen	146.941.448	141.429.056	100,00	96,25	100,00	100,00	100,00
1	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	90.844.706	86.988.171	100,00	95,75	100,00	100,00	100,00
2	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	11.180.110	10.691.740	100,00	95,63	100,00	100,00	100,00
3	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	44.916.632	43.749.146	100,00	97,40	100,00	100,00	100,00
TOTAL			172.031.802	165.461.990	100,00	96,18	100,00	100,00	100,00

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/> status: 31 Desember 2024



Lampiran 3

Penghargaan



SERTIFIKAT

AWARENESS SNI ISO 37001 : 2016

DIBERIKAN KEPADA

Rendi Haidir

Dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Karena telah mengikuti pelatihan Awareness SNI ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Hotel Grand Kemang, Jakarta.



Ir. Benny Prawira

Direktur PT WEBGIS INDONESIA



Rosi Putri Aryani, S.Kom.

Direktur PT KREASI MUTU INDONESIA



Iman Mujib Ahmad, S.E.

Trainer

SERTIFIKAT

AUDIT INTERNAL
SNI ISO 37001 : 2016

DIBERIKAN KEPADA

Rendi Haidir

Dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Sebagai tanda telah mengikuti pelatihan Audit Internal SNI ISO 37001 : 2016 untuk Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diselenggarakan
pada tanggal 21 Oktober 2024 di Hotel Royal Padjajaran, Bogor.



Ir. Benny Prawira

Direktur PT WEBGIS INDONESIA



Rosi Putri Aryani, S.Kom.

Direktur PT KREASI MUTU INDONESIA



Iman Mujib Ahmad, S.E.

Trainer

No. : 227/MAS/ADM/XII/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Jl. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Perihal : Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini Kami serahkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, yang telah di setujui atas Implementasi dan Usaha Memelihara Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, oleh karena itu untuk selanjutnya Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, dapat membubuhkan logo PT. Mutu Andalan Sistem (MAS) ISO 37001:2016 dalam setiap kegiatan usaha yang sesuai dengan ruang lingkup yang telah di sepakati pada saat Sertifikasi.

Penerapan sistem Manajemen tersebut di harapkan dapat selalu di tingkatkan dengan melakukan improvement dan inovasi yang perlu bagi pengembangan organisasi, di samping tetap memelihara sistem yang sudah ada, hal ini harus tetap menjadi komitmen yang konsisten bagi manajemen serta jajarannya dan semua pihak yang terkait dalam proses kerja untuk dapat membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan merespons penyuapan secara efektif.

Kami mengucapkan selamat dan sukses atas perolehan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Syaiful Hadi, S.Kom

Manajer Administrasi & Publikasi

Tembusan:

- Yth. Direktur
- Yth. Manager Sertifikasi
- Yth. Manager Mutu
- Arsip



CERTIFICATE

No. 3624038

This is to certify the implementation and maintenance of the
Anti-Bribery Management Systems for :

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Jl. Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Indonesia

Has been approved to the following Anti-Bribery Management Systems
and assessed to conform with the standard :

SNI ISO 37001:2016

Which activities are applicable to the scope of :

“Formulating and implementing Policies in water resources
infrastructure financing”

Initial Certification Date	: 28-11-2024	1 st Surveillance	: 28-11-2025
Issue Date	: 28-11-2024	2 nd Surveillance	: 28-11-2026
Valid Until	: 27-11-2027	Recertification	: 27-11-2027

This certificate is issued after successfully assessed to conform with
the Anti-Bribery Management Systems of SNI ISO 37001:2016.

Director

This certificate will be issued annually for approval
thirty-six (36) months from registered by MAS.



PT. MUTU ANDALAN SISTEM

Perkantoran Ciganjur Express,
Jl. Moh. Kahfi 1 No.90A, RT.5/RW.5, Ciganjur,
Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

- ☎ 021-2780 3999
- ☎ 08129412241
- ✉ info@mutuandalan.co.id
- ✉ mutuandalansistem@gmail.com





Lampiran 4

Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7200793

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 19 / BA / Dp / 2024

Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 bertempat di Hotel Kuretakeso Kemang Jakarta Selatan telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ /INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SS: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau			
IKSS: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	59,79	59,74	99,92
SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP: Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	200,06	200,06
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS 1. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100,00	163,47	163,47
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	100,00	99,33	99,33
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	99,37	99,96	100,59

2. Capaian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI TA. 2024

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	14,96	99,73
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15	100
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15,34	102,27
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15,43	102,85
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	14,50	96,65
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	15	15,24	101,58
7	Nilai SAKIP Unit Organisasi	10	10,13	101,30

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100	111,73	111,73

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25	23,77	95,08

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25	26,38	105,52

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25	25,42	101,68

f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25	24,73	98,92
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100	100,55	100,55

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2024

Yang Menyepakati,

Sekretaris Direktorat Jenderal



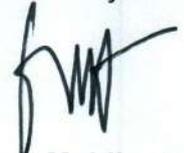
Reni Ahiantini

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



Agus Sulaeman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Harya Muldianto

Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan



Erna Wijayanti

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Meike Kencanawulan Martawidjaja

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Haryo Bektu Martoyoedo

Mengetahui,
Direktur Jenderal



Triho Junoasmono

Lampiran Berita Acara Kesepakatan Capaian
Kinerja DJPI TA. 2024

Nomor : 19/BA/DP/2024

Tanggal : 31 Desember 2024

A. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2024

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	24.220.000.000.000	220.000	24.577.192.153.214	200.300
2	Subsidi Selisih Bunga (SSB)*	4.609.438.646.000	751.735	4.609.438.646.000	732.927
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	895.000.000.000	220.000	852.348.000.000	208.869
4	SMF	-	11.540	12.400.526.222.312	271.653
5	TAPERA	1.431.900.000.000	7.251	934.222.383.307	5.780
TOTAL		31.156.338.646.000	238.791	43.373.727.404.833	477.733

Keterangan:

Target unit berdasarkan Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024

*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 751.735 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

**) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

B. Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
1	Perencanaan	9	44 Responden	97,27%	29,18%
2	Pelaksanaan	7		97,12%	
3	Outcomes	5		97,42%	

Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada 44 Responden didapatkan nilai sebesar 97,27%, sehingga **capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 adalah sebesar 29,18%**.

C. Capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
1	Input Kegiatan	10	44 Responden	98,75	29,33
2	Aktivitas Kegiatan	3		98,23	
3	Output Kegiatan	2		97,85	

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
4	Outcomes Kegiatan	9		97,42	
5	Impact Kegiatan	2		96,55	

Hasil Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada 44 Responden didapatkan nilai sebesar 97,76%, sehingga **capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024** adalah sebesar **29,33%**.

D. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan (35%)

NO	SEKTOR	TARGET	REALISASI		
		JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	TAHAPAN
1	Sumber Daya Air	9	10	Bendungan Lambakan	Perencanaan
				Bendungan Saddang	Perencanaan
				DI Jambo Aye, Aceh	Penyiapan
				DI Lhok Guci, Aceh	Penyiapan
				Bendungan Merangin	Penyiapan
				PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	Penyiapan
				Bendungan Bodri	Penyiapan
				Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok	Penyiapan
				Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering	Penyiapan
				Bendungan Cidanau	Penyiapan
2	Jalan dan Jembatan	8	3	Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang	Penyiapan
				Jalan Tol Pluit Bandara	Penyiapan
				Jalan Tol Malang - Kepanjen	Penyiapan
3	Perumahan	2	3	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	Penyiapan
				Rusun Cisaranten Bina Harapan	Penyiapan
				Rusun Kota Surabaya	Penyiapan

NO	SEKTOR	TARGET	REALISASI		
		JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	TAHAPAN
4	Permukiman	5	6	SPAM Bitung	Penyiapan
				Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Singdangheula	Penyiapan
				SPAM Regional Lombok	Penyiapan
				SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	Penyiapan
				SPAM - SPAL IKN	Penyiapan
				SPAM Regional Ayung I	Penyiapan
5	Lainnya	-	2	Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengelolaan SPAM	Penyiapan
				KSP Wisma Werdhapura	Penyiapan
TOTAL		24	24		
Capaian Proyek Tahap Perencanaan dan Penyiapan (35%)			35%		

Keterangan:

- Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS)

E. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Siap Dikerjasamakan Tahun 2024 (35%)

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI			
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI	TAHAPAN
1	Sumber Daya Air	2	2.570.400.000.000	1	PLTA Tiga Dihaji, Sumatera Selatan	920.399.742.833	<i>Bid Award</i>
2	Jalan dan Jembatan	2	28.210.000.000.000	4	Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi	25.404.000.000.000	PQ
					Flyover Sitinjau Lauik	2.793.000.000.000	<i>Bid Award</i>
					Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi	21.012.000.000.000	PPJT
					Jalan Tol Palembang – Betung	14.981.000.000.000	PPJT
3	Perumahan	2	996.424.481.923	1	Rusun Karawang Spuur	272.474.481.923	Pengajuan Lelang
4	Permukiman	2	4.802.000.000.000	2	B to B SPAM Kertasari	1.047.000.000.000	<i>Financial Close</i>
					SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 lpd	3.755.000.000.000	Pembentukan BUP
TOTAL		8	36.578.824.481.923	8	70.184.874.481.923		
Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (35%)				35%			
Capaian Nilai Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)				134,31%			

Keterangan:

- Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Proyek Siap Dikerjasamakan minimal masuk Tahap Prakualifikasi
- Nilai Investasi yang dihitung sebagai capaian IKSS merupakan nilai investasi proyek siap untuk lelang (minimal Tahap Prakualifikasi)

F. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEUANGAN (%)		FISIK (%)		
					RN	RL	RN	RL	KINERJA
I	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.090.354	24.032.934	100,00	95,79	100,00	100,00	100,00
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	25.090.354	24.032.934	100,00	95,79	100,00	100,00	100,00
II	WA	Program Dukungan Manajemen	146.941.448	141.429.056	100,00	96,25	100,00	100,00	100,00
1	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	90.844.706	86.988.171	100,00	95,75	100,00	100,00	100,00
2	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	11.180.110	10.691.740	100,00	95,63	100,00	100,00	100,00
3	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	44.916.632	43.749.146	100,00	97,40	100,00	100,00	100,00
TOTAL			172.031.802	165.461.990	100,00	96,18	100,00	100,00	100,00

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/> status: 31 Desember 2024



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2023

Pada hari Senin tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. Nama : Desy Nina Wulandari
Jabatan Pada Tim Evaluator : Supervisor
NIP : 197705032005011008
2. Nama : Bayu Kusuma Dwi Chandra Sarie
Jabatan Pada Tim Evaluator : Ketua
NIP : 198108032009011001
3. Nama : Nurul Fauzia
Jabatan Pada Tim Evaluator : Anggota
NIP : 198103112009122001
4. Nama : Puteri Rizqi Amelia
Jabatan Pada Tim Evaluator : Anggota
NIP : 199405182019032006

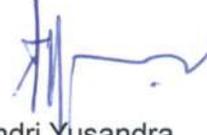
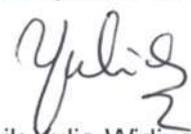
Bertindak sebagai perwakilan Evaluator Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sesuai dengan Surat Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: 162/SPT/Ps/2024 tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Andri Yusandra
Jabatan Pada Tim Evaluatan : Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi
NIP : 196811051997031001
2. Nama : Eko Supartono
Jabatan Pada Tim Evaluatan : Analis Kebijakan Ahli Madya / Ketua Tim Pokja
Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA
NIP : 196407011987031001
3. Nama : Nanik Yulia Widiyanti
Jabatan Pada Tim Evaluatan : Ahli Kebijakan Ahli Muda
NIP : 198007272008022003

Bertindak sebagai perwakilan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air atau evaluatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berikut adalah hasil kesepakatan antara Evaluator dan Evaluatan, sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2023 dengan uraian sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara.
2. PIHAK KEDUA sepakat melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kinerja akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan terhadap perbaikan atau perubahan manajemen kinerja yang masih perlu dilakukan oleh PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA/EVALUATOR	PIHAK KEDUA/EVALUATAN
<p>Supervisor, Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan</p>  <p>Desy Nina Wulandari NIP. 197705032005011008</p>	<p>Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi</p>  <p>Andri Yusandra NIP. 196811051997031001</p>
<p>Ketua, Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya</p>  <p>Bayu Kusuma Dwi Chandra Sarie NIP. 198108032009011001</p>	<p>Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA</p>  <p>Eko Supartono NIP. 196407011987031001</p>
<p>Anggota,</p> <p>Nurul Fauzia NIP. 198103112009122001</p>  <p>Puteri Rizqi Amelia NIP. 199405182019032006</p> 	<p>Analis Kebijakan Ahli Muda</p>  <p>Nanik Yulia Widiyanti NIP. 198007272008022003</p>

LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
1.	Perencanaan Kinerja				
a.	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	-	-		
b.	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	Target indikator kinerja utama belum dapat tercapai berdasarkan capaian kinerja Direktorat PPISDA di tahun 2020, 2021 dan 2023 (hanya tahun 2022 yang tercapai sesuai target pada dokumen perencanaan).	Direktorat PPISDA perlu untuk melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Perjanjian Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya) sehingga dapat tercapai dokumen perencanaan yang SMART yang mencakup penggunaan metrik yang relevan, pengukuran yang akurat, dan penetapan tujuan yang realistis dan terukur. Dapat pula dilakukan dengan melibatkan pemantauan secara teratur dan penyesuaian strategi jika diperlukan.	Direktorat PPISDA akan melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan yang SMART	Sepakat

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
c.	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	-	Tetap melakukan perencanaan kinerja dengan melibatkan seluruh entitas unit kerja dari tingkat staf hingga tingkat Direktur	Akan tetap dilakukan perencanaan kinerja dengan melibatkan seluruh entitas unit kerja	Sepakat
2.	Pengukuran Kinerja				
a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	Mekanisme pengumpulan data kinerja berdasarkan SOP Pengukuran kinerja tingkat unit eselon I dikarenakan belum terdapat SOP terkait pada tingkat unit kerja	Mendukung mekanisme pengumpulan data kinerja pada Direktorat PPISDA, maka perlu untuk menyusun SOP Pengukuran Data kinerja / pengumpulan data kinerja tingkat unit eselon II di tahun 2024	Direktorat PPISDA akan menyusun SOP Pengukuran Data kinerja / pengumpulan data kinerja tingkat Direktorat di tahun 2024	Sepakat
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakannya tindak lanjut terkait standar penilaian realisasi dan target fisik yang belum dijabarkan dengan jelas • Indikator penilaian inovatif dan percontohan nasional belum dapat terpenuhi pada subkomponen ini dikarenakan belum terdapat inovasi dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan standar penilaian capaian fisik. Dapat dilakukan melalui pembobotan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penilaian capaian realisasi fisik • Inovasi pengukuran kinerja dalam mencapai target melalui koordinasi 		

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
		pengukuran kinerja dan yang menjadi percontohan nasional	bersama unit kerja lainnya di lingkungan DJPI dalam merumuskan metode pengukuran kinerja, contoh berupa pengukuran capaian kinerja terhadap progres pelaksanaan Proyek KPBU <i>Solicited</i> dan <i>Unsolicited</i>		
c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan di tahun 2023 mengingat SE Menteri PUPR Nomor 23/SE/M/2023 baru ditetapkan pada Desember 2023	Berdasarkan SE Menteri PUPR Nomor 23/SE/M/2023, penerapan penyesuaian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga Direktorat PPISDA perlu berkoordinasi dengan Setditjen dalam penerapan SE tersebut	Penerapan penyesuaian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja akan dilaksanakan pada tahun 2024	Sepakat
3.	Pelaporan Kinerja				
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Monev Bulanan Direktorat PPISDA telah disusun dan diupload secara berkala pada e-sakip namun masih terdapat keterlambatan penyampaian (lebih dari 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat PPISDA perlu untuk memastikan penyampaian laporan untuk tidak melebihi batas waktu maksimal sesuai dengan Permen PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 (5 hari kerja); 	<ul style="list-style-type: none"> Pengunggahan Laporan Monev Bulanan akan memperhatikan batas waktu sesuai dengan Permen PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 dan akan melengkap waktu pengesahan dan 	Sepakat

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
		<p>5 hari kerja) secara online ke dalam aplikasi e-sakip;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Laporan Monev Bulan Januari, Februari dan Agustus masih belum terdapat tanggal pada lembar Kata Pengantar (pengesahan oleh pimpinan Unit Eselon II); • Penggunaan lembar kendali baru diterapkan di tahun 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada pengesahan dan penyampaian setiap laporan kepada pimpinan dan e-sakip; • Perlunya untuk mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam monitoring capaian kinerja organisasi 	<p>penyampaian kepada pimpinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam monitoring capaian kinerja organisasi disampaikan pada laporan kegiatan. 	
b.	<p>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan dokumen laporan kinerja selanjutnya tetap disusun sesuai dengan Permen PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 dan panduan penulisan laporan kinerja yang diterbitkan oleh BPIW • Direktorat PPISDA perlu menyampaikan detail capaian kinerja selama periode Renstra pada Laporan Kinerja berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen laporan kinerja Direktorat PPISDA selanjutnya tetap disusun sesuai dengan Permen PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 dan panduan penulisan laporan kinerja yang diterbitkan oleh BPIW • Direktorat PPISDA akan mendetailkan capaian kinerja selama periode Renstra pada Laporan Kinerja berikutnya. 	Sepakat

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Terdapat penurunan capaian kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2021.	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kerja perlu untuk melakukan pembahasan terkait penyesuaian/reviu perencanaan kinerja secara berkala sekurangnya setiap tahun berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya; • Identifikasi Kendala dan permasalahan dalam pencapaian kinerja dengan pembahasan dan dapat dijadikan masukan dalam penyusunan/ penyesuaian rencana kerja tahun berikutnya • Menyusun strategi pelaksanaan kegiatan dan kinerja selama tahun berjalan dari identifikasi kendala/ permasalahan pencapaian kinerja 	Pembahasan terkait penyesuaian/reviu perencanaan kinerja secara berkala sudah dilakuan setiap tahun, namun pada TA 2023 beberapa proyek tertunda prosesnya sehingga berdampak pada turunnya nilai PK	Sepakat
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-	Melaksanakan evaluasi AKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menindaklanjuti atas	Direktorat PPISDA akan tetap melaksanakan evaluasi AKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan	Sepakat

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
			rekomendasi yang diberikan secara real	menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan secara real	
b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan menggunakan aplikasi belum dapat terpenuhi dikarenakan evaluasi menggunakan aplikasi (e-sakip) belum dilaksanakan secara sesuai mandat nasional (belum terdapat surat pernyataan penggunaan evaluasi melalui aplikasi oleh Itjen)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Direktorat PSSPP selaku koordinator AKIP DJPI untuk melakukan evaluasi AKIP menggunakan aplikasi (e-sakip) dan berkoordinasi dengan Biro PAKLN untuk segera menetapkan penggunaan e-sakip dalam evaluasi AKIP • Meningkatkan kapasitas sumber daya dengan memberikan pelatihan/workshop dan sertifikasi dari level pimpinan hingga staf. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pembicaraan dengan Direktorat PSSPP seara internal dalam penggunaan aplikasi (e-SAKIP) • Beberapa pegawai Direktorat PPISDA akan diikutsertakan pelatihan Akuntabilitas 	Sepakat
c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	Capaian kinerja Direktorat PPISDA tahun 2023 (sebesar 22,91%) lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 (sebesar 25,00%)	Monitoring capaian kinerja berkala (bulanan atau triwulanan) untuk mengidentifikasi kemampuan unit kerja dalam mencapai target yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya dapat dilakukan strategi untuk	Monitoring capaian kinerja berkala (bulanan atau triwulanan) telah dilaksanakan, namun perlu ditetapkan definisi yang jelas mengenai proyek KPBU yang siap dikerjasamakan/kesepakatan dalam perhitungan capaian kinerja	Sepakat

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
			dapat memaksimalkan capaian kinerja tersebut.		

**LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
1.	Perencanaan Kinerja				
a.	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	-	-		
b.	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	Target indikator kinerja utama belum dapat tercapai berdasarkan capaian kinerja Direktorat PPISDA di tahun 2020, 2021 dan 2023 (hanya tahun 2022 yang tercapai sesuai target pada dokumen perencanaan).	Direktorat PPISDA perlu untuk melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Perjanjian Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya) sehingga dapat tercapai dokumen perencanaan yang SMART yang mencakup penggunaan metrik yang relevan, pengukuran yang akurat, dan penetapan tujuan yang realistis dan terukur. Dapat pula dilakukan dengan melibatkan pemantauan secara teratur dan penyesuaian strategi jika diperlukan.	ada & lakukan reviu terhadap dokumen perencanaan	Cypti-

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
c.	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	-	Tetap melakukan perencanaan kinerja dengan melibatkan seluruh entitas unit kerja dari tingkat staf hingga tingkat Direktur	Alasan itu tetap dilakukan perencanaan kinerja dgn melibatkan uker, & tpt & s	Sesuai
2.	Pengukuran Kinerja				
a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	Mekanisme pengumpulan data kinerja berdasarkan SOP Pengukuran kinerja tingkat unit eselon I dikarenakan belum terdapat SOP terkait pada tingkat unit kerja	Mendukung mekanisme pengumpulan data kinerja pada Direktorat PPISDA, maka perlu untuk menyusun SOP Pengukuran Data kinerja / pengumpulan data kinerja tingkat unit eselon II di tahun 2024	Tahap lebih lanjut & thn 2024	Sesuai
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakannya tindak lanjut terkait standar penilaian realisasi dan target fisik yang belum dijabarkan dengan jelas • Indikator penilaian inovatif dan percontohan nasional belum dapat terpenuhi pada subkomponen ini dikarenakan belum terdapat inovasi dalam pengukuran kinerja dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan standar penilaian capaian fisik. Dapat dilakukan melalui pembobotan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penilaian capaian realisasi fisik • Inovasi pengukuran kinerja dalam mencapai target melalui koordinasi bersama unit kerja lainnya di lingkungan DJPI dalam merumuskan metode 		

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
		yang menjadi percontohan nasional	pengukuran kinerja, contoh berupa pengukuran capaian kinerja terhadap progres pelaksanaan Proyek KPBU <i>Solicited</i> dan <i>Unsolicited</i>		
c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan di tahun 2023 mengingat SE Menteri PUPR Nomor 23/SE/M/2023 baru ditetapkan pada Desember 2023	Berdasarkan SE Menteri PUPR Nomor 23/SE/M/2023, penerapan penyesuaian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga Direktorat PPISDA perlu berkoordinasi dengan Setditjen dalam penerapan SE tersebut	Penerapan Pengukuran Kinerja dgn penyusunan tahun & tahun di 2024.	Sepakat.
3.	Pelaporan Kinerja				
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Monev Bulanan Direktorat PPISDA telah disusun dan diupload secara berkala pada e-sakip namun masih terdapat keterlambatan penyampaian (lebih dari 5 hari kerja) secara online ke dalam aplikasi e-sakip; 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat PPISDA perlu untuk memastikan penyampaian laporan untuk tidak melebihi batas waktu maksimal sesuai dengan Permen PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 (5 hari kerja); Mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada pengesahan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengunggahan Lap monev bulanan akan memperhatikan batas waktu Dokumentasi keabsahan pimpinan telah disiapkan dan ND keagda. 	Sepakat.

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pada Laporan Monev Bulan Januari, Februari dan Agustus masih belum terdapat tanggal pada lembar Kata Pengantar (pengesahan oleh pimpinan Unit Eselon II); • Penggunaan lembar kendali baru diterapkan di tahun 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> • penyampaian setiap laporan kepada pimpinan dan e-sakip; • Perlunya untuk mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam monitoring capaian kinerja organisasi 		
b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	-	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan dokumen laporan kinerja selanjutnya tetap disusun sesuai dengan Permen PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 dan panduan penulisan laporan kinerja yang diterbitkan oleh BPIW • Direktorat PPISDA perlu menyampaikan detail <u>capaian kinerja</u> selama <u>periode Renstra</u> pada Laporan Kinerja berikutnya. 	Dokumen Laporan Kinerja akan lebih sesuai sesuai Permen PUPR No. 9/PRT/M/2018 dan memenuhi detail capaian kinerja pada Renstra Renstra	Sepakat
c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian	Terdapat penurunan capaian kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kerja perlu untuk melakukan pembahasan terkait penyesuaian/reviu perencanaan kinerja 	akun telah pembahas terkait penyesuaian / reviu perencanaan	Sepakat

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
	strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	pada tahun 2022 dan 2021.	<p>secara berkala sekurangnya setiap tahun berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Kendala dan permasalahan dalam pencapaian kinerja dengan pembahasan dan dapat dijadikan masukan dalam penyusunan/ penyesuaian rencana kerja tahun berikutnya • Menyusun strategi pelaksanaan kegiatan dan kinerja selama tahun berjalan dari identifikasi kendala/ permasalahan pencapaian kinerja 		
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-	Melaksanakan evaluasi AKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan secara real		Cepat
b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang	• Mendorong Direktorat PSSPP selaku koordinator		

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
	secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	dilaksanakan menggunakan aplikasi belum dapat terpenuhi dikarenakan evaluasi menggunakan aplikasi (e-sakip) belum dilaksanakan secara sesuai mandat nasional (belum terdapat surat pernyataan penggunaan evaluasi melalui aplikasi oleh Itjen)	<p>AKIP DJPI untuk melakukan evaluasi AKIP menggunakan aplikasi (e-sakip) dan berkoordinasi dengan Biro PAKLN untuk segera menetapkan penggunaan e-sakip dalam evaluasi AKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas sumber daya dengan memberikan pelatihan/workshop dan sertifikasi dari level pimpinan hingga staf. 	<p>-Direktur PPISDA Tde Manasory Dde PBBSP 4/melalui Evaluasi AKIP menggunakan APWIS PO Surat perintah</p>	Sesuai
c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	Capaian kinerja Direktorat PPISDA tahun 2023 (sebesar 22,91%) lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 (sebesar 25,00%)	Monitoring capaian kinerja berkala (bulanan atau triwulanan) untuk mengidentifikasi kemampuan unit kerja dalam mencapai target yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya dapat dilakukan strategi untuk dapat memaksimalkan capaian kinerja tersebut.	Mantau Capaian Kinerja Berkala Bulanan & Triwulan	Sesuai



Lampiran 5

Dokumentasi Kegiatan









PPISDA ALPU
RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROYEK KPBU
SEKTOR SUMBER DAYA AIR QUARTAL II TA 2024
DAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
QUARTAL II TA 2024

JAWA BARAT, 22 JULI 2024



PPISDA
RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROYEK KEBU
SEKTOR SUMBER DAYA AIR KUARTAL II TA 2024
DAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
KUARTAL II TA 2024
JAWA BARAT, 27 AGUSTUS 2024



PPISDA PUPR

RENTAUAN DAN EVALUASI PROYEK KPBU
R SUMBER DAYA AIR QUARTAL III TA 2024
PAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN
YAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
TAL III TA 2024

EN, 29 OKTOBER 2024

ppur_pembayaran x pur_pembayaran f Pur Pembayaran yur_pembayaran







PPISDA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROYEK KPBU
SEKTOR SUMBER DAYA AIR QUARTAL IV TA 2024
DAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
QUARTAL IV TA 2024
BANTEN, 17 DESEMBER 2024















